

**DAMPAK PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH, PRIGI TERHADAP
MASYARAKAT PESISIR
(Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Desa Tasikmadu,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :

FARHANA MANA ALDJAIDI

NIM. 0610840018



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2010

**DAMPAK PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH, PRIGI TERHADAP
MASYARAKAT PESISIR
(Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Desa Tasikmadu,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan di
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :

FARHANA MANA ALDJAIDI

NIM. 0610840018



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2010

**DAMPAK PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH, PRIGI TERHADAP
MASYARAKAT PESISIR
(Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Desa Tasikmadu,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)**

Oleh :

**FARHANA MANA ALDJAIDI
NIM. 0610840018**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing I**

**Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP
NIP. 14610417 199002 2 002**

**Dr. Ir. Edi Susilo, MS
NIP. 19591205 198503 1 003**

Tanggal : _____ Tanggal: _____

Dosen Pembimbing II

**Ir. Ismadi, MS
NIP. 19490515 197802 1 001**

Tanggal: _____

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pariwisata.....	9
2.1.1 Pengertian Pariwisata.....	9
2.1.2 Manfaat dan Tujuan Pariwisata.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Obyek Wisata.....	17
2.1.4 Sarana dan Prasarana Pariwisata.....	19
2.2 Fungsi dan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pariwisata.....	21
2.3 Masyarakat Pesisir.....	26
2.3.1 Pengertian Masyarakat Pesisir.....	26
2.3.2 Karakteristik Masyarakat Pesisir.....	28
2.3.3 Jenis Kegiatan Masyarakat.....	31
2.4 Wisatawan.....	33
2.4.1 Pengertian Wisatawan.....	33
2.4.2 Jenis-Jenis Wisatawan.....	34
2.5 Dampak Pariwisata.....	34
2.5.1 Dampak Positif.....	36
2.5.2 Dampak Negatif.....	37
2.6 Perencanaan Ekologi.....	37
2.6.1 Pengertian Ekowisata.....	39
2.6.2 Prinsip Ekowisata.....	45
2.7 Kerangka Pemikiran.....	49
III. METODE PENELITIAN	50
3.1 Tempat dan waktu Penelitian.....	50
3.2 Metode Penelitian.....	50
3.3 Obyek Penelitian dan Jenis Penelitian.....	51
3.4 Populasi dan Jenis Penentuan Sampel.....	53
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	54
3.6 Analisis Data.....	56
3.7 Batasan Masalah penelitian.....	58
3.8 Keabsahan Data.....	59
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 keadaan Umum Lokasi Obyek Wisata.....	62
4.1.1 Kondisi Geo dan Topografis Kabupaten Trenggalek.....	62

4.1.2 Kondisi Geo dan Topografis Kecamatan Watulimo.....	64
4.1.3 Kondisi Geo dan Topografis Desa Tasikmadu.....	65
4.1.4 Keadan Penduduk Desa Tasikmadu	67
4.1.5 Sarana dan Prasarana Penunjang perekonomian	68
4.2 Potensi dan Sumber Daya Alam Wisata.....	73
4.3 Peranan Pemerintah (Dinas Pariwisata) Terhadap Obyek Wisata.....	95
4.3.1 Rencana Pengembangan Sosial Budaya	100
4.3.2 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana	101
4.3.3 Peningkatan Peran Pelaku Wisata	104
4.3.4 Sosialisasi dan Kerja Sama dalm Pengembangan Pariwisata	107
4.4 Dampak Pariwisata	109
4.4.1 Dampak Pariwisata terhadap Sosial.....	111
4.4.2 Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan	115
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	123



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 1. Prinsip dan Kriteria Ekowisata	46
Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Tasikmadu	66
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	67
Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	68
Tabel 5. Kebutuhan BBM Armada Perikanan di Kawasan Prigi	70
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Tasikmadu	72
Tabel 7. Potensi Wisata di Trenggalek	72
Tabel 8. Karakteristik dan Potensi Obyek wisata Pantai Prigi	74
Tabel 9. Karakteristik dan Potensi Obyek wisata Pantai Pasir Putih	82
Tabel 10. Daftar Pengunjung Obyek Wisata tahun 2008	93
Tabel 11. Daftar Pengunjung Obyek Wisata tahun 2009	94
Tabel 12. Potensi dan Masalah Pada obyek Wisata Pantai	96
Tabel 13. Karakteristik Dampak Lingkungan	110
Tabel 14. Potensi Dampak Lingkungan Biogeofisika	117



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1. Kerangka Berfikir	49
Gambar 2. Peta Kabupaten Trenggalek.....	63
Gambar 3. Area Parkir Pantai Prigi.....	76
Gambar 4. Area Parkir Pantai Pasir Putih.....	76
Gambar 5. Hotel Prigi	76
Gambar 6. Warung Makan Pantai Prigi.....	77
Gambar 7. Mushollah Pantai Prigi	77
Gambar 8. <i>Souvenir Shop</i> pada obyek wisata Pantai Prigi.....	78
Gambar 9. Kegiatan Narik Jaring Pada Obyek Wisata Pantai Prigi.....	79
Gambar 10. Kegiatan Jumat Bersih	80
Gambar 11. Ruko-ruko Dikawasn Prigi.....	81
Gambar 12. Upacara Adat <i>Larung Sembonyo</i>	82
Gambar 13. Macam-macam Kerang.....	87
Gambar 14. Jetty dan Perahu Pengawasan	88
Gambar 15. Pengunjung di Kawasan Obyek Wisata.....	92
Gambar 16. Bagan Proses Pencemaran Lingkungan.....	115
Gambar 17. Pencemaran Lingkungan	116



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

HALAMAN

- 1. Penjabaran Pokok Dan Fungsi DISPORAPARIBUD Kabupaten Trenggalek 123
- 2. Hasil Wawancara Terhadap masyarakat Pesisir 131



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan laut sekitar 5,8 juta km² persegi (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut Nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan luas wilayah daratan adalah 1,9 juta km² (25% dari total wilayah Indonesia). Sementara itu, di dalam wilayah daratan tersebut terdapat perairan umum (sungai, rawa, dan waduk) seluas 54 juta ha atau 0,54 juta km² (27% dari total wilayah daratan Indonesia) (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 29 Maret 2010).

Dari data tersebut, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata air, baik perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat meliputi, mata air, air yang mengalir dipermukaan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah membentuk sungai, danau, rawa dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Perairan Laut adalah wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh air asin. Perairan laut dari pantai sampai ke dasar laut sampai ke dasar laut.

Dipilihnya pariwisata sebagai salah satu sumber devisa karena pariwisata oleh para ahli ekonomi dianggap sebagai “industri tanpa cerobong asap” yang berarti bahaya maupun kerugian yang ditimbulkannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan industri-industri lainnya yang padat teknologi. Namun demikian tidak berarti bahwa pariwisata tidak mendatangkan bahaya yang dapat menimbulkan resiko (Yoeti, 1993). Salah satu resiko yang dihadapi oleh industri

pariwisata adalah perubahan kebudayaan masyarakat sekitar obyek wisata akibat pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat pendatang maupun wisatawan.

Pariwisata merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah yang dimana dari sektor andalan pemerintah adalah untuk memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Sumbangan pariwisata bagi pembangunan nasional, selain menyumbangkan devisa bagi negara, pariwisata juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, memperluas wawasan nusantara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air (Karyono, 1997).

Dalam menghadapi perkembangan persaingan global dan daerah diperlukannya melakukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dari sentralisasi ke arah desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pemberdayaan (*empowering*) daerah dan pemberdayaan masyarakat melalui otonomi daerah, maka ditetapkan Undang-Undang peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2009, maka Pemerintahan Daerah mempunyai konsekuensi dimana semua wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menetapkan kewenangan di dalam mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya, menetapkan dan mengusahakan sendiri sumber pendapatan asli daerah, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha, menarik para investor serta memperkenalkan budaya daerah.

Pariwisata budaya sebagai suatu kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di Indonesia menekankan pada penampilan unsur-unsur budaya sebagai aset utama untuk menarik wisatawan berkunjung ke obyek wisata Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa aspek-aspek lainnya akan ditinggalkan seperti keindahan alam, pantai dan pemandangan, flora dan fauna termasuk kehidupan bawah laut, olah raga, serta jenis hiburan lainnya.

Unsur-unsur budaya memiliki manfaat yang penting diantara lain adalah untuk mempromosikan kepariwisataan secara umum baik dalam maupun luar negeri, produk seni budaya akan menyiapkan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat, penampilan seni dan budaya selain menarik perhatian wisatawan juga meningkatkan pemberdayaan seni dan budaya, penampilan seni dan budaya dapat meningkatkan pemeliharaan dan manajemen museum, galeri dan monumen-monumen seni budaya lainnya, dana yang dihasilkan dengan penjualan produk seni dan budaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sentuhan dengan seni dan budaya lain meningkatkan harkat, kehormatan dan pemahaman tentang arti kemanusiaan.

Berkaitan dengan hal diatas, pengembangan pariwisata Indonesia menggunakan konsepsi pariwisata budaya yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Yang mempunyai daya tarik seperti segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan".

Sektor pariwisata bahari merupakan sektor yang paling efisien di bidang kelautan, sehingga pengembangan wisata bahari perlu mendapatkan prioritas. Pembangunan wisata bahari pemanfaatan obyek dan daya tarik berupa wisata alam (pantai), keragaman flora dan fauna (*biodiversity*) seperti taman laut. Produk wisata yang perlu dikembangkan adalah wisata pantai (*seaside tourism*), wisata persiar (*cruise tourism*), wisata alam (*ecotourism*), Wisata bisnis (*business tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), maupun wisata olahraga (*sport tourism*). Di wilayah Indonesia terdapat berbagai daerah wisata bahari yang memiliki potensi keindahan alam serta atraksi-atraksi wisata yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun manca negara. Potensi tersebut memerlukan pendayagunaan yang lebih efektif, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional (Kusumastanto, 2003).

Jawa Timur merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang potensial, hampir disetiap Kabupaten atau Kota yang memiliki daerah tujuan wisata yang menarik. Daerah tujuan wisata di Jawa Timur meliputi wisata budaya dan wisata alam. Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso (Pantai Pasir Putih) adalah merupakan pantai yang termasuk daerah pariwisata yang berada di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

Obyek wisata Pantai Prigi merupakan obyek wisata andalan Kabupaten Trenggalek, dimana Pantai Prigi sudah menjadi *Icon* atau *image brand* untuk wisata pantai Kabupaten Trenggalek. Obyek wisata Prigi merupakan sisi lain dari obyek wisata pantai selatan Kabupaten Trenggalek dengan ciri khas yang

berbeda dari obyek wisata pantai lainnya, dimana merupakan salah satu pusat usaha perikanan di pantai Selatan Jawa. Hal ini diantaranya bisa dilihat dari jumlah keterlibatan penduduk lokal dalam kegiatan terkait perikanan yakni sebanyak 3.030 KK yakni 20,37% dari keseluruhan di pantai ini juga tempat pelelangan dan pengolahan ikan, obyek wisata Pantai Desa Tasikmadu sangat panjang dan memiliki keindahan yang unik dibanding dengan pantai-pantai lainnya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pemda Jawa Timur telah mengembangkan kawasan ini sebagai tempat pelelangan ikan terbesar di pantai selatan pulau Jawa. Sehingga aktivitas ekonomi di daerah ini pun meningkat.

Sebagai salah satu sumberdaya wisata di Kabupaten Trenggalek, obyek wisata Pantai Prigi dan Pasir Putih mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang ada penambahan berupa berbagai fasilitas yang ada didalamnya. Dengan penambahan fasilitas tersebut diharapkan tempat ini menjadi obyek wisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal, regional maupun wisatawan mancanegara.

Kunjungan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, cepat atau lambat akan membawa dampak atau pengaruh yang kuat baik positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebudayaan, Ekonomi, dan Lingkungan masyarakat setempat. Perubahan-perubahan pada masyarakat akan terjadi akibat adanya kontak langsung dengan dunia luar yang masing-masing membawa ciri budayanya sendiri.

Dalam pengembangan obyek wisata Pantai Desa Tasikmadu, dampak tersebut tampaknya belum begitu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Hal itu mendorong peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Dampak Pariwisata Pantai Pasir Putih, Prigi Terhadap Masyarakat Pesisir (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Wisatawan, baik yang berasal dari mancanegara maupun yang datang dari pelosok-pelosok tanah air, memiliki latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Semua itu akan berpengaruh besar terhadap lingkungan atau kondisi masyarakat tempat tujuan wisata tersebut. Pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata budaya akan membantu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan setempat. Interaksi sosial antara wisatawan dengan masyarakat setempat di daerah pariwisata tersebut akan menimbulkan masalah-masalah sosial baru yang tidak terbatas pada pola-pola interaksi sosial diantara mereka yang terlibat saja, akan tetapi juga mempengaruhi sistem nilai budaya setempat serta timbulnya nilai sosial baru (Depdikbud, 1993: dalam Prastiasih, 2005).

Perkembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial budaya saja, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi, lingkungan, religi atau pengetahuan masyarakat setempat pada tingkat intensitas tertentu. Dampak tersebut dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dampak ini terutama lebih menonjol pada masyarakat di sekitar obyek wisata.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keadaan Sumber Daya Alam (SDA) wisata yang ada di wisata Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih?
2. Bagaimana dukungan atau peran serta pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam menangani obyek wisata Pantai yang berada di Desa Tasikmadu?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif pengembangan obyek wisata terhadap lingkungan dan sosial masyarakat daerah setempat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui profil Sumber Daya Alam (SDA) wisata yang ada di wisata Pantai Prigi dan pantai Pasir Putih.
2. Mengetahui dukungan kebijakan atau peran serta pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam menangani obyek wisata Pantai Prigi dan juga Pantai Pasir Putih.
3. Mengetahui dampak pariwisata Pantai Pasir Putih dan Prigi terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai dampak pengembangan pariwisata Pantai Desa Tasikmadu terhadap kebudayaan masyarakat di sekitar obyek wisata, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Masyarakat

- Dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterjaminan hidup masyarakat Pesisir Desa Tasikmadu.
- Dapat berpartisipasi aktif terhadap upaya menjaga kelestarian dari lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku.

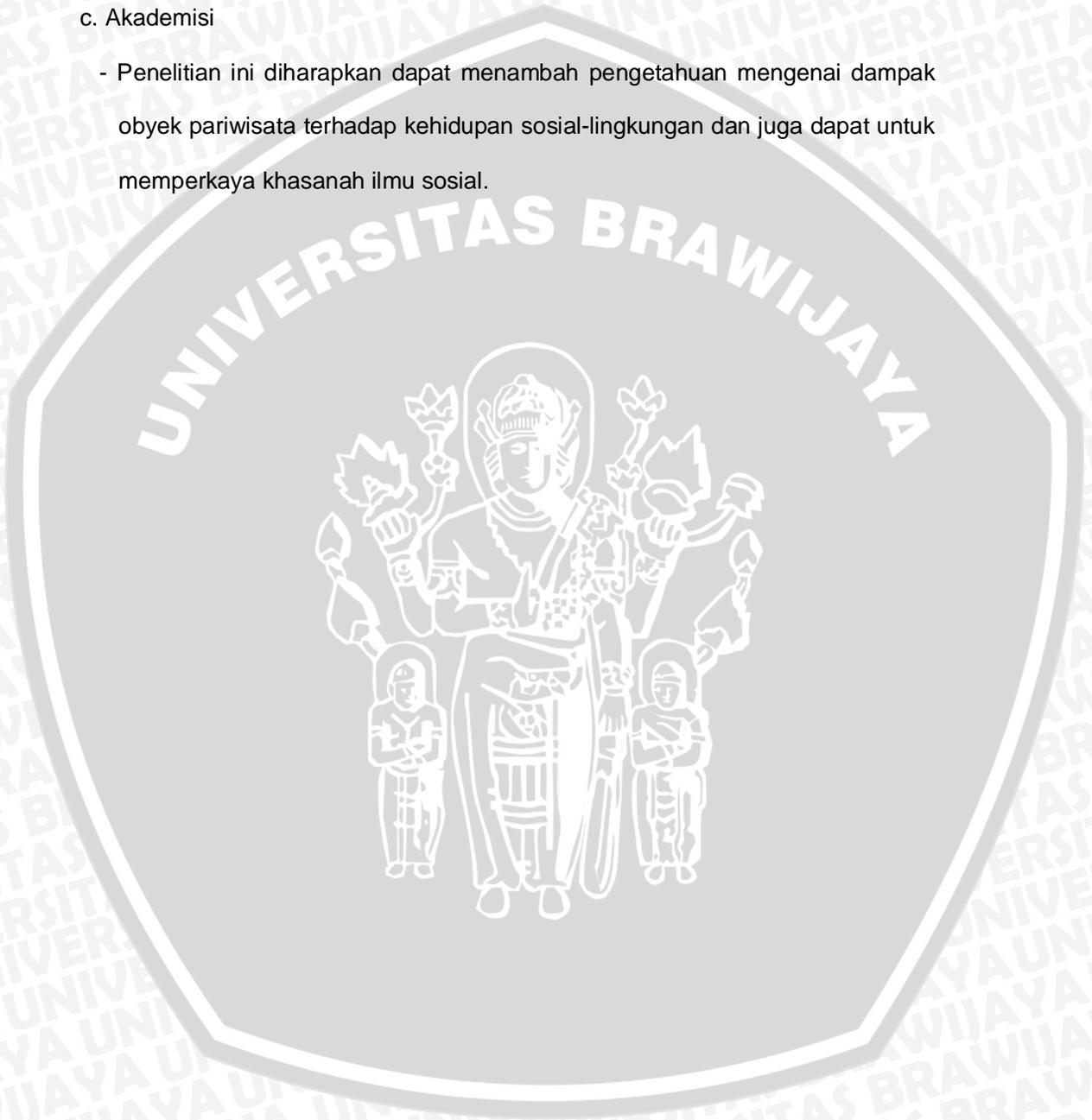
b. Pemerintah Daerah

- Dapat mendorong pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap warga pesisir yang berakifitas di daerah obyek wisata dengan melakukan tindakan dan evaluasi hukum sehingga dapat mengarah kepada

perbaikan hukum serta proses pengarahan terhadap masyarakat untuk lebih mengerti dan mematuhi kebijakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang ada.

c. Akademisi

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai dampak obyek pariwisata terhadap kehidupan sosial-lingkungan dan juga dapat untuk memperkaya khasanah ilmu sosial.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata

2.1.1 Pengertian Pariwisata

The World Organization (WTO), sebuah lembaga kajian dan pendukung usaha wisata antar pemerintah yang bermakas di Madrid, mendefinisikan aktifitas wisata sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan “keluar dari lingkungan asalnya” untuk tidak lebih dari satu tahun berlibur, berdagang, atau urusan lainnya (Hakim, 2004).

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*pari*” yang berarti banyak, berkali-kali, lengkap dan “*wisata*” yang berarti perjalanan, bepergian. Sedangkan pengertian pariwisata secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan wisata termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain di bidang itu. Wisata diartikan sebagai perjalanan seseorang atau kelompok ke destinasi wisata (*travel*). Sementara pariwisata merupakan usaha jasa pelayanan yang melayani keperluan perjalanan seseorang atau kelompok ke destinasi wisata (*tourism/travel industry*). Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata pada tataran makro (IPOLEKSOSBUDHANKAM) (*tourism*). (www.budpar.com)

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya. Sedangkan menurut UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Secara etimologis terdapat beberapa penyebaran kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan pariwisata (Yoeti,1996) yaitu antara lain:

1. Wisata : Perjalanan dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan kata *“travel”*.
2. Wisatawan : Orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan istilah *“travellers”*.
3. Pariwisata : Perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *“tour”*.
4. Kepariwisataaan : Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *“tourism”*.

Menurut Yoeti (1996), secara etimologis, pariwisata terdiri dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata, dimana dijelaskan bahwa pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap. Wisata berarti perjalanan, berpegian. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Spillane (1990), pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10/2009 tentang Kepariwisataan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kepariwisataan.

Menurut Soekadijo (1996), mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Sedangkan yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal ditempat yang didatanginya. Sedangkan, menurut Burkart dan Medik, pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Selanjutnya, Musanef (1995) mengartikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi wisata di tempat lain atau memenuhi keinginan yang beranekaragam. Biasanya pariwisata mencakup keinginan tentang:

- a. Keseluruhan fenomena alam atau buatan manusia yang dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan.
- b. Kegiatan-kegiatan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan aktifitas.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan bersifat sementara dari satu tempat ke tempat yang lain dan bertujuan untuk kesenangan atau menikmati keindahan suatu tempat yang dikunjungi. Atau dengan kata lain pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik-buruknya lingkungan.

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Pariwisata

a. Manfaat Pariwisata

Menurut Roslita (2000), beberapa manfaat pariwisata yang utama, ialah sebagai berikut:

1. *Multiplier Effect* (efek berganda)

Pengeluaran wisatawan disuatu daerah wisata (misalnya untuk makanan, cenderamata) masuk ke dalam ekonomi lokal. Sekian persen dari nilai tersebut kemudian dibelanjakan oleh yang menerimanya (si penjual makanan) dalam masyarakat misalnya untuk membeli pakaian; uang didapat oleh si penjual pakaian kemudian dibelanjakan lagi; demikian selanjutnya.

Semakin besar pengeluaran wisatawan yang masuk dalam perekonomian lokal dan semakin besar persentase yang dibelanjakan secara lokal, maka semakin besar manfaat ekonominya. Semakin mandiri suatu masyarakat (tidak tergantung pada produk dari luar wilayahnya), semakin besar efek bergandanya.

2. Diversifikasi

Pariwisata dapat menciptakan diversifikasi produk, menjadikan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada suatu sektor utama, seperti pertanian, pertambangan yang merupakan sektor-sektor yang sangat berfluktuatif.

3. Kesempatan Kerja

Sektor pariwisata adalah industri yang padat karya dan menciptakan kesempatan kerja yang besar bagi generasi muda baik pekerjaan yang *part time* maupun *full time*.

4. Peningkatan Fasilitas bagi Penduduk

Pertumbuhan sektor pariwisata menghasilkan penambahan dan perbaikan fasilitas yang tidak hanya digunakan oleh wisatawan, tetapi juga oleh penduduk.

5. Kesempatan Berusaha

Pariwisata juga menciptakan kesempatan bagi munculnya produk-produk baru, fasilitas pelayanan dan pengembangan bisnis yang sudah ada.

6. Mempercepat Pengembangan Pemukiman

Kegiatan wisata mendorong tumbuhnya permukiman penduduk yang akan berusaha di sektor tersebut. Dibanyak tempat, pengunjung yang pertama-tama melakukan perjalanan ke suatu daerah untuk liburannya, ada yang akhirnya menjadi penduduk lokal.

7. Peningkatan Pelayanan Transportasi

Pariwisata juga dapat memacu pembangunan dan peningkatan pelayanan transportasi dalam suatu wilayah.

8. Kesempatan Pendidikan

Sektor ini juga memberikan kesempatan yang makin luas kepada penduduk melalui pengenalan pendidikan lanjutan dan kursus-kursus atau pelatihan khusus.

9. Preservasi Lingkungan

Pariwisata menggarisbawahi kebutuhan pengaturan yang tepat, melalui kebijakan dan rencana yang efektif, untuk menjamin kelestarian lingkungan suatu wilayah agar tetap terjaga.

10. Pengembangan Wawasan Sosial

Interaksi sosial antar masyarakat dengan wisatawan domestik maupun internasional akan memperluas wawasan.

11. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan proyek pariwisata yang baru seringkali menghasilkan pembangunan infrastruktur baru maupun peningkatan kualitas yang sudah ada, yang tentu saja memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Tujuan Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Tujuan pengembangan pariwisata, bukan hanya sekadar peningkatan perolehan devisa bagi negara, akan tetapi lebih jauh diharapkan pariwisata dapat berperan sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*). Dilihat dari sudut ekonomi, sedikitnya ada delapan keuntungan menurut Yoeti (2008), dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, yaitu:

1. Peningkatan kesempatan berusaha
2. Kesempatan kerja
3. Peningkatan penerimaan pajak
4. Peningkatan pendapatan nasional
5. Percepatan proses pemerataan pendapatan
6. Meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan
7. Memperluas pasar produk dalam negeri, dan

8. Memberikan dampak *multiplier effect* dalam perekonomian sebagai akibat pengeluaran wisatawan, para investor, maupun perdagangan luar negeri.

2.1.3 Jenis-jenis Obyek Wisata

Di dalam dunia pariwisata, istilah obyek dan daya tarik wisata mempunyai pengertian sebagai sesuatu kegiatan perjalanan yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau calon wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata bersifat sementara. Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dapat berupa obyek wisata alam, budaya, dan sejarah, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi atau menjadi sasaran bagi wisatawan.

Setiap daerah mempunyai bermacam-macam jenis pariwisata yang dikembangkan sebagai kegiatan yang lama-kelamaan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Untuk kepentingan pengembangan atau perencanaan sektor dari pariwisata itu sendiri, perlu pula dibedakan untuk jenis pariwisata yang ada, agar dapat ditentukan kebijakan apa yang mendukung dalam pariwisata ini, sehingga jenis pariwisata yang dikembangkan akan dapat terwujud dengan apa yang diharapkan.

Obyek dan daya tarik wisata disebut juga atraksi wisata. Atraksi wisata mencakup: Atraksi wisata alam misalnya iklim, pantai dan laut, flora dan fauna, gua, air terjun, serta hutan yang indah. Atraksi wisata budaya misalnya arsitektur rumah tradisional di desa, situs arkeologi, benda-benda seni dan kerajinan, ritual atau upacara budaya, festival budaya, kegiatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari, keramah-tamahan, makanan. Atraksi buatan misalnya acara olahraga, berbelanja, pameran, konferensi, festival musik.

Ada beberapa jenis dan sumber-sumber pariwisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Menurut Musanef (1995), obyek dan daya tarik wisata dapat dibagi menjadi:

1. Obyek dan daya tarik wisata alam terdiri dari:
 - a. Obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di kawasan konservasi, yaitu kawasan hutan atau kawasan pelestarian alam yang pengelolaannya dan pengawasannya berada dalam wewenang Departemen Kehutanan dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Obyek dan daya tarik wisata ini seperti: Taman Nasional, Tawan Wisata, Taman Burung, Taman Laut, Taman Hutan Raya, dan sebagainya.
 - b. Obyek dan daya tarik yang terdapat di luar kawasan konservasi. Obyek dan daya tarik wisata ini dikelola oleh Pemerintah Daerah, perum Perhutani dan taman Safari.
2. Obyek dan daya tarik wisata budaya atau sejarah: peninggalan sejarah, candi, keratin, monument, dan sebagainya.
3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus: wisata argo, wisata buru, wisata tirta, wisata kesehatan, dan sebagainya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Musanef, maka dapat diambil kesimpulan bahwa obyek dan daya tarik wisata dapat dibagi menjadi tiga jenis obyek dan daya tarik wisata, yaitu obyek dan daya tarik wisata alam, budaya atau sejarah, dan obyek daya tarik wisata minat khusus.

Kekayaan nilai budaya yang dimiliki setiap daerah sangat menarik minat wisatawan untuk datang mengunjungi daerah dengan tujuan wisata yang ada. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai pendorong atau motivasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata.

2.1.4 Sarana dan Prasarana Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata tentu tidak lepas dari upaya pengembangan sarana dan prasarana wisata, karena keduanya selalu berhubungan erat. Menurut Yoeti (1992), sarana dan prasarana kepariwisataan dapat diartikan sebagai semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, tetapi hidup dan kehidupannya tidak selamanya akan tergantung kepada wisatawan.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatannya adalah melayani wisatawan dan kehidupannya tidak selamanya tergantung pada kunjungan wisatawan.

1. Sarana Pariwisata

Sarana pariwisata meliputi sarana pokok, sarana pelengkap dan sarana penunjang. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sarana Pokok Pariwisata

Sarana pokok pariwisata adalah fasilitas minimal yang harus terdapat pada suatu daerah tujuan wisata. Pada dasarnya, perusahaan yang mengelola sarana ini hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan. Adapun yang termasuk dalam sarana pokok pariwisata ini seperti: sarana penghubung, sarana angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya.

b. Sarana Pelengkap Pariwisata

Sarana pelengkap pariwisata merupakan fasilitas-fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok, sehingga fungsi sarana pelengkapan ini dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan atau tempat tinggal

yang dikunjungi. Adapun yang termasuk dalam saran ini adalah sarana olahraga, dan lainnya sebagainya.

c. Sarana Penunjang Pariwisata

Sarana penunjang pariwisata diperlukan untuk menunjang sarana pokok dan sarana pelengkap agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya ke tempat yang dikunjungi. Adapun yang termasuk dalam sarana ini misalnya bioskop dan lain sebagainya.

2. Prasarana pariwisata

Menurut Yoeti (1992), prasarana merupakan semua fasilitas yang memproses perekonomian berjalan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan pengertian tersebut, prasarana pariwisata dapat disimpulkan sebagai semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana wisata dapat hidup berkembang dan memberikan kemudahan atau pelayanan yang baik bagi wisatawan.

Adapun yang termasuk dalam prasarana pariwisata adalah:

- a. Prasarana ekonomi : Yang termasuk didalamnya adalah angkutan, komunikasi, sistem perbankan, dan termasuk dalam kelompok utilitas. Misalnya listrik dan sumber air.
- b. Prasarana sosial : Sebagai penunjang kegiatan pariwisata adalah seperti pelayanan kesehatan, petugas yang langsung melayani wisatawan, pramuwisata, faktor keamanan, dan sebagainya.

Tersedianya sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang pariwisata dan juga prasarana ekonomi, dan prasarana sosial yang memadai dalam

bidang pariwisata akan dapat memberikan daya tarik bagi para wisatawan dan juga kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung pada daerah tujuan wisata yang ada.

2.2 Fungsi dan Peranan Pemerintah Daerah dalam Pariwisata

Dengan adanya konsep otonomi daerah yang asas desentralisasi mengakibatkan kewenangan penuh daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas proses pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pariwisata mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan cukup besar untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi di daerah.

Dalam membahas fungsi dan peranan daerah dalam pariwisata secara terperinci maka lebih dahulu dikembangkan pengertian fungsi dan peranan. Menurut Moekijat yang menyatakan bahwa fungsi menunjukkan kegiatan pada pekerjaan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan peranan telah diuraikan di atas.

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para *stakeholders*. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan kedalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

Peraturan pemerintah dalam pariwisata memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: (1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (*deposit payment*) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, *tour* dan lain-lain; (2) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada dimasing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir, dan nahkoda.

Selain itu pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya alam seperti; flora dan fauna yang langka; air, tanah dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan masyarakat. Dan salah satu bidang tugas pemerintah tersebut adalah pembangunan sektor pariwisata. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintahan Daerah dalam rangka pembangunan sektor pariwisata juga mempunyai peran dan fungsi untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah yang ada di daerahnya. Dari hal tersebut diatas, maka fungsi pemerintah daerah khususnya dalam sektor pariwisata adalah sebagai pelaksana sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan pariwisata tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikekmukakan oleh Pendit (1994) yang menyatakan bahwa fungsi pokok Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata adalah:

- a. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan di daerahnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan kepariwisataan.
- b. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari upaya pembangunan sektor kepariwisataan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat atasnya.

Dengan demikian, agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu adanya dukungan atau kerjasama dengan badan atau organisasi lainnya yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata tersebut, seperti Dinas Pariwisata Daerah (Disparda), dimana tugas pokoknya menurut Pendit (1994) adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan penelitian, riset, merumuskan dan mengusulkan kebijakan kepariwisataan pada tingkat kepala daerah, sehingga tercapai suatu usaha yang terkoordinir dan terarah menuju pengembangan kepariwisataan di daerah yang bersangkutan secara menyeluruh.

2. Menggerakkan dan mendayagunakan seluruh potensi di daerah yang diarahkan menuju pengembangan kepariwisataan di daerah yang bersangkutan.
3. Memberikan saran-saran kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di daerah kepada Gubernur Kepala Daerahnya.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha-usaha pengembangan kepariwisataan yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
5. Ikut serta dalam kerjasama antar daerah dan mewakili daerahnya pada tingkat pusat.

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam sektor kepariwisataan adalah bagaimana pemerintah daerah sanggup menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, melakukan koordinasi antar aparatur pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Disinilah peran dan fungsi suatu organisasi kepariwisataan yang ada, baik yang berada di daerah maupun yang berada di tingkat nasional. Sebagai suatu organisasi yang diberi tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di wilayahnya, ia harus menjalankan kebijaksanaan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas suatu organisasi pariwisata pada umumnya tidak lain ialah:

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan ke daerahnya dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dengan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.

- c. Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata terhadap orang banyak, sehingga mereka mengerti dan mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai industri.
- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisatawan dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran diwaktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan perlengkapan dan fasilitas yang mendukung kegiatan pemasaran pariwisata, sehingga dapat diataur srategi pemasaran untuk keseluruhan wilayah.
- f. Merumuskan kebijaksanaan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan juga berencana.

Oleh karena itu, peran dan fungsi pemerintah daerah khususnya dalam hal sektor pariwisata ini sangat vital dan perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak agar tujuan tersebut selain dapat terwujud, dampak sebagai akibat pengembangan sektor pariwisata pada akhirnya akan membawa angin segar bagi perekonomian dan kesejahteraan pada umumnya.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2007 dalam Astuti (2010) juga telah menyebutkan mengenai program *Good Governance* dalam rangka pengembangan pariwisata Indonesia, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan suatu usaha dalam pengembangan pariwisata untuk menjadikan pariwisata itu sendiri sebagai salah satu bentuk industri perdagangan jasa yang dapat memberikan kontribusi yang

besar terhadap pendapatan daerah, keuntungan pihak pengelola dan masyarakat setempat.

2.3 Masyarakat Pesisir

2.3.1 Pengertian Masyarakat Pesisir

Menurut Ralph Lington dalam Ngadiyono (1994), dikatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan menurut Mac Iver dalam Ngadiyono (1994), menyebutkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari pada cara kerja dan prosedur dari pada otoritas, dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat juga mempunyai hubungan dengan lingkungan fisik yang menghasilkan bentuk-bentuk akomodasi tertentu didalam organisasinya. Masyarakat tersusun atas dasar hakekat manusia, sedangkan bentuknya ditentukan oleh alam, dan modifikasi yang terjadi sulit ditentukan akibatnya pada manusia kecuali setelah jangka waktu yang lama (Soekanto, 1993).

Sistem sosial terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Masyarakat adalah sistem sosial dengan tingkat indenpendensi yang absolut sebetulnya tidak ada, oleh karena itu hal tersebut bertentangan dengan kedudukan sebagai suatu sub sistem yang harus berhubungan dengan lingkungannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan indenpendensi adalah adanya stabilitas dalam

hubungan pertukaran dengan lingkungannya serta kemampuan mengontrol. Pertukaran itu demi kelancaran jalanya usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri (Raharjo, 1999).

Suatu masyarakat bila dilihat sebagai suatu satuan yang tersusun dari sejumlah lembaga-lembaga yang masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam lembaga-lembaga itu dijumpai hubungan antara anggota-anggota masyarakat berupa tingkah laku yang dijalankan dan diikuti suatu cara tertentu yang disepakati dalam lingkungan itu. Karena adanya cara-cara bertingkah laku tertentu yang disepakati itu, maka dalam masyarakat terbentuklah suatu pola hubungan tertentu, yaitu pola hubungan yang ditentukan oleh harapan-harapan tentang bagaimana anggota masyarakat itu hendaknya bertingkah laku. Dalam keadaan yang demikian itu maka tingkah laku anggota masyarakat tidak sekedar merupakan suatu pergerakan badaniah, melainkan tindakan yang memenuhi harapan tertentu yang disebut sebagai tingkah laku yang disipliner oleh harapan dalam masyarakat. Lembaga bisa juga disebut sebagai sistem peranan. Didalam lembaga itu peranan yang satu berhubungan dengan peranan yang lain, artinya peranan itu tidak berdiri sendiri (Raharjo, 1999).

Masyarakat perikanan adalah masyarakat yang secara keseluruhan bergerak disektor perikanan. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki unit usaha dibidang penangkapan, budidaya ikan, pengelolaan ikan, perdagangan ikan dan pekerjaan perikanan.

Sedangkan, masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Tentu saja masyarakat pesisir tidak hanya nelayan saja tetapi juga

pembudidaya ikan, pengolahan ikan, bahkan pedagang ikan. Namun, secara empiris, dikalangan dari masyarakat pesisir itu sendiri, pelaku ekonomi di subsistem produksi primer-nelayan dan pembudiya ikan itu sendiri sering kali menemui sejumlah masalah diantaranya ketidak-adilan harga, lemahnya teknologi, modal yang terbatas, ketergantungan terhadap musim, terbatasnya sumberdaya manusia, terbatasnya akses sumberdaya, dan juga lemahnya dalam berorganisasi. Sehingga, posisi merekapun lemah diantara pelaku-pelaku usaha lainnya.

2.3.2 Karakteristik Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluaristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya bahwa stuktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik dari masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena, stuktur masyarakat pesisir sangat plurar, sehingga mampu membentuk sistem dan nilai budaya yang merupakan akluturasi budaya dari masing-masing komponen yang membentuk stuktur masyarakatnya.

Bagi masyarakat pesisir dan laut misalnya, sumber daya laut dan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi mereka sangat mengenal lingkungan sekitar mereka dan tahu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup secara harmonis dan tetap dapat mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alam di dalamnya.

Menurut Listriana, Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat adat di dalam mengelola wilayah laut dan pesisir juga memiliki kekuatan eksternal yang memberikan potensi besar bagi masyarakat untuk melakukan ancaman dari orang luar, termasuk dari Negara. Masyarakat adat telah melindungi dan mempertahankan

hak dan kewajiban mereka jauh bahkan sebelum negara itu ada. Pengakuan kepemilikan masyarakat adat terhadap wilayah laut dan pesisir bukan atas pemberian Negara melainkan secara alamiah merupakan bagian dari legenda dan sejarah masyarakat adat itu sendiri. Wilayah adat yang mereka diami merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun diwariskan. Hak memiliki atau mengelola dari masyarakat adat menekankan pada 3 (tiga) elemen mendasar, yaitu:

1. Otoritas hukum untuk mengelola lingkungan.
2. Otoritas penuh untuk menentukan nasib sendiri.
3. Hak untuk memberikan persetujuan terhadap setiap rencana kegiatan atau kebijakan negara yang berdampak pada nasib masyarakat itu sendiri.

Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir hidup didekat pantai merupakan hal yang paling diinginkan untuk dilakukan mengingat segenap aspek kemudahan yang dapat mereka peroleh dalam berbagai aktifitas kesehariannya. Contoh sederhana yang didapat dalam kemudahannya adalah pertama, bahwa kemudahan aksesibilitas dalam sumber mata pencaharian lebih terjamin, mengingat sebagian masyarakat pesisir menggantungkan kehidupannya melalui pemanfaatan potensi perikanan dan laut yang terdapat disekitarnya. Kedua, bahwa dari masyarakat pesisir mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan untuk mencuci, mandi dan kaskus, dimana mereka dapat menceburkan dirinya untuk membersihkan tubuhnya, selain itu mencuci segenap peralatan dan perlengkapan rumah tangga, dan juga mereka lebih mudah dalam membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke pantai atau laut.

Masyarakat pesisir juga mempunyai sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang khas dan unik. Sifat ini sangat erat kaitannya dengan sifat usaha dibidang perikanan

itu sendiri. Karena sifat dari usaha perikanan yang ada sangat erat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti musim, lingkungan dan juga pasar. Dari faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi karakteristik dari masyarakat pesisir itu sendiri. Beberapa sifat-sifat atau karakteristik dari masyarakat pesisir diuraikan sebagai berikut menurut Wahyudin (2006) :

a. Ketergantungan Pada Kondisi Lingkungan

Salah satu sifat usaha perikanan atau usaha yang sangat menonjol dilihat dari kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir sangat tergantung pada kondisi lingkungan itu dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pencemaran, karena limbah industri maupun tumpahan minyak, misalnya dapat menggoncang sendi-sendi kehidupan masyarakat pesisir. Pencemaran di pantai Jawa beberapa waktu yang lalu menyebabkan produksi udang tambak anjlok secara drastis. Hal ini tentu mempunyai konsekuensi yang besar terhadap kehidupan para pembudidaya tambak tersebut.

b. Ketergantungan Pada Musim

Disini masyarakat pesisir ketergantungan terhadap musim khususnya masyarakat nelayan. Ketergantungan musim ini dapat berpengaruh bagi nelayan kecil terhadap pendapatan yang didapatnya. Pada saat musim penangkapan para nelayan sibuk melaut, sehingga pendapatan yang didapatkan juga sangat berfluktuasi dari hari ke hari, bahkan mereka mampu membeli meja, kursi, bahkan kulkas. Tetapi pada saat kebalikannya yaitu musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur, sehingga

pendapatan mereka juga ikut menurun drastis, sehingga kehidupan mereka juga semakin memburuk.

c. Ketergantungan Terhadap Pasar

Karakteristik lain dari usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ini adalah ketergantungan terhadap harga pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan oleh mereka itu harus dijual baru bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jika petani padi yang bersifat tradisional bisa hidup tanpa menjual produknya atau hanya menjual sedikit saja, maka nelayan dan pembudidaya kebalikannya dari petani padi, mereka harus menjual sebagian besar hasil tangkapannya juga hasil dari tambaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari para nelayan dan pembudidaya.

Karakteristik diatas mempunyai implikasi yang sangat penting, yakni masyarakat perikanan sangat peka terhadap harga. Perubahan harga produk perikanan sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan.

2.3.3 Jenis Kegiatan Masyarakat Pesisir

Menurut Kusnadi (2009), dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia dikawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut: pemanfaatan langsung sumberdaya lingkungan (seperti nelayan, pembudidaya ikan diperairan pantai menggunakan aring apung atau keramba, pembudidaya rumput laut atau mutiara, dan para tambak), pengolahan hasil ikan atau hasil laut lainnya (seperti pemindangan, pengasapan, pengeringan ikan, pengusaha terasi atau pengusaha

tepung ikan atau krupuk ikan), penunjang kegiatan ekonomi perikanan (seperti pemilik toko atau warung, pengusaha angkutan, tukang perahu, dan buruh kasar atau disebut manol).

Di desa-desa pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberi peluang mata pencarian bagi sebagian besar penduduknya melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau sekelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomii, dan budaya masyarakat pesisir. Karena masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi sangat besar. Peluang kerja disektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat desa-desa lain di daerah hulu yang berbatasan dengan desa nelayan tersebut.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: memiliki struktur relasi parton-klien sangat kuat, etos kerja yang tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembangkitan kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat menjadi ranah kaum perempuan), dan berperilaku "komsumtif".

2.4 Wisatawan

2.4.1 Pengertian Wisatawan

Menurut *UN. Convention Concerning Customs Facilites For Touring* (1954)

Wisatawan adalah setiap orang yang datang disebuah Negara karena alasan yang sah kecuali untuk berimigrasi dan yang tinggal setidaknya-tidaknya 24 Jam dan selamalamanya 6 Bulan dalam tahun yang sama.

Dalam pengertian ini wisatawan dibedakan berdasarkan waktu dan tujuan yang disebut wisatawan adalah orang-orang yang berkunjung setidaknya 24 jam dan yang datang berdasarkan motivasi mengisi waktu senggang seperti bersenang, berlibur, untuk kesehatan, studi, keperluan agama, dan olahraga, serta bisnis, keluarga, peurtusan, dan pertemuan-pertemuan.

Sedangkan ekskurisionis adalah pengunjung yang hanya tinggal sehari di Negara yang dikunjungi tanpa bermalam. Pengertian ini paling banyak digunakan karena pembedanya tegas sehingga mudah dipahami antara pengunjung yang bisa disebut wisatawan, dan pengunjung yang hanya ekskurisionis saja.

Menurut Undang-undang Pariwisata No. 10 tahun 2009 menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Seseorang atau lebih yang melakukan perjalanan wisata serta melakukan kegiatan yang terkait dengan wisata disebut wisatawan. Wisatawan warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata disebut Wisatawan Nusantara (Wisnus). Wisatawan warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata disebut Wisatawan Mancanegara (Wisman)

2.4.2 Jenis-jenis Wisatawan

Berdasarkan pengetahuan dan motivasinya dalam kegiatan wisata, wisatawan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni wisatawan biasa dan wisatawan *eco-tourist*. Menurut Hakim (2004), hal yang membedakan antara keduanya yakni kategori *eco-tourist* mempunyai motivasi mengunjungi destinasi wisata dengan maksud khusus. Berdasarkan minatnya tersebut, *ecotourismt dapat* dibedakan sebagai berikut:

1. *Hard core nature tourist*, merupakan penelitian atau anggota paket tur atau perjalanan yang memang didesain atau dirancang untuk pendidikan alam dan penelitian.
2. *Dedicated nature tourist*, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan, terutama untuk mengunjungi atau melihat kawasan-kawasan lindung. Selain itu, mereka ingin mengetahui keindahan lanskap dan kekayaan hayati serta budaya lokal.
3. *Mainstream nature tourist*, yaitu wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman yang lain dari pada yang telah didapatkan sebelumnya.
4. *Cassual nature tourist*, yaitu wisatawan yang menginginkan pengalaman menikmati alam sebagai bagian, dari perjalanan yang lebih besar.

2.5 Dampak Pariwisata

Banyak wisatawan yang datang di suatu lokasi wisata berasal dari tempat yang jauh, bahkan ada yang dari luar negeri. Banyak pula lokasi wisata yang letaknya didaerah pedesaan dan wisatawan datang dari kota. Jadi wisatawan itu banyak mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan penduduk lokal. Sudah sewajarnya terjadi saling mempengaruhi antara penduduk

lokal dengan wisatawan. Dalam interaksi ini terjadi hal-hal yang positif, dan ada pula yang negatif.

Pariwisata terutama pariwisata internasional termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi. Dari pariwisata diharapkan dapat diperoleh devisa, baik dalam pengeluaran uang para wisatawan di Negara kita, maupun sebagai penanaman modal asing dalam industry pariwisata (Soemardjan, 1974 dalam Murniatmo dan dkk, 1993).

Selanjutnya, menurut Hartono mengatakan bahwa peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi budaya (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

Namun perlu diperhatikan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, bahwa pembangunan kepariwisataan membawa konsekuensi. Konsekuensi itu adalah timbulnya dampak sosial budaya yang merugikan kelestarian kebudayaan yang bersangkutan (Budhisantoso, 1992). Selain itu, dapat mengisyaratkan bahwa dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup.

Bahwa timbulnya dampak sosial budaya sebagai konsekuensi dari pengembangan pariwisata itu dapat dilihat sebagai dampak yang positif dan dampak yang negatif dapat ditelusuri sebagai kerugian yang timbul akibat pengembangan pariwisata. Pada hakekatnya ada tiga bidang pokok yang kuat dipengaruhi, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Erawan, 1997).

2.5.1 Dampak Positif

Dampak positif yang menguntungkan adalah dalam bidang ekonomi. Adanya pariwisata mendatangkan pendapatan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja yang berarti mengurangi jumlah pengangguran serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standart hidup mereka. Hal ini diperkuat oleh Cleland (1979) dalam Erawan, yang mengatakan bahwa pariwisata mampu memberikan kesempatan kerja dan pekerjaan yang timbul tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Selain itu, menurut Yoeti (1997) juga bahwa dampak dari pariwisata terhadap perekonomian di Indonesia adalah memperbaiki kesempatan kerja atau dapat mengurangi pengangguran, peningkatan penerimaan pajak dan retibusi daerah, meningkatkan pendapatan nasional, memperkuat posisi neraca pembayaran, memberikan efek *multiplier* dalam perekonomian setempat.

Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah dibidang perhotelan, biro-biro perjalanan, pramuwisata atau pemandu wisata (*guides*), pusat-pusat rekreasi, instansi pariwisata pemerintah memerlukan pula tenaga trampil. Sebagian besar adalah tenaga kerja tetap biro-biro perjalan, sedang sebahian kecil *guides free-lace*. Untuk memberi kesempatan kerja dibeberapa daerah diselenggarakan ujian-ujian pramuwisata untuk mendapatkan *licensing* (Hartono,1994).

Dampak positif yang lain dengan hadirnya pariwisata ini adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya teknologi dan system pengetahuan. Kemajuan teknologi yang dibarengi dengan tingkat pengetahuan yang maju pula akan membawa masyarakat penerima wisatawan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman atau modernisasi. Walau disatu

pihak kehadiran pariwisata ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap kebudayaan. Untuk itu perlu kita waspadai (Soedarsono, 1991).

2.5.2 Dampak Negatif

Dampak negatif yang merupakan kerugian tampak menonjol dalam bidang sosial, yaitu pada gaya hidup masyarakat ini tampak pada perubahan sikap, tingkah laku, perilaku karena kontak langsung dengan para wisatawan yang berasal dari budaya yang berbeda. Gaya hidup wisatawan asing diperhatikan oleh warga masyarakat dan ditiru begitu saja.

Dalam bidang kebudayaan terjadi komersialisasi budaya. Tempat suci atau ziarah diangkat dijadikan obyek wisata; tari-tarian sakral dan adat istiadat diangkat dari lingkungan yang normal dipergelarkan untuk memuaskan kebutuhan para wisatawan. Kemudian dalam bidang lingkungan hidup terjadi pengrusakan lingkungan alam, penebangan pohon untuk digunakan tempat pembangunan (Beding, 1990). Selain itu juga, pencemaran kebudayaan dan hilangnya sifat kepribadian negara yang menerima kedatangan wisatawan melalui urbanisasi dan modernisasi untuk meningkatkan lalu lintas wisatawan. Sering terjadi pengerusakan yang sifatnya *vandalism* yang dapat merubah kepribadian dan cara hidup dengan mengkomersialkan keramah-tamahan yang dimiliki penduduk setempat.

2.6 Perencanaan Ekologi Wisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan diantara para

stakeholders. Masing-masing daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.

Selain itu, menurut yoeti dalam Winardi (1997), keuntungan-keuntungan dari pada perencanaan itu sendiri adalah: pertama-tama *planning* menyebabkan aktifitas-aktivitas yang dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu; *planning* menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif diminimalisir; *planning* membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil yang dicapai; ada pendapatan yang menyatakan *planning* menyebabkan fasilitas-fasilitas yang ada didalam sebuah perusahaan dipergunakan lebih baik; dipandang dari sudut marginal maka *planning* memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan, yang jelas serta lengkap; *planning* juga memberikan suatu keadaan untuk pengawasan (waktu-waktu tertentu serta menyelesaikan setiap aktivitas-aktivitas).

2.6.1 Pengertian Ekologi Wisata

Apabila kita merujuk pada dua kata *Eco* dan *Tourism*, yang ketika di Indonesiakan menjadi kata Eko dan Turisme atau Eko dan Wisata . Makna dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, Eko yang dalam bahasa Greek (Yunani) berarti Rumah, dan *Tourism* yang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata *Eco* dapat diartikan sebagai *Ecologi* atau *Ekonomi* sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata ekologis (*Ecological Tourism*) atau Wisata Ekonomi (*Economic Tourism*) dan hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut. Untuk lebih jelas mengenai beberapa pendapat para ahli *ecotourisme* (Dirawan,2003).

Istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam.

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Sementara ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian

lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Para pelaku dan pakar dibidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi.

Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah *ecotourism*, yaitu ekoturisme. Terjemahan yang seharusnya dari *ecotourism* adalah wisata ekologis. Yayasan Alam Mitra Indonesia (1995) membuat terjemahan *ecotourism* dengan ekoturisme. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah ekowisata yang banyak digunakan oleh para rimbawan. Hal ini diambil misalnya dalam salah satu seminar dalam Reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fandeli,1998). Kemudian Nasikun (1999), mempergunakan istilah ekowisata untuk menggambarkan adanya bentuk wisata yang baru muncul pada dekade delapanpuluhan.

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural aren*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. *Eco-traveler* ini pada hakekatnya konservasionis.

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* (1990) sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi

lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga (fandeli, 2010).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekowisata adalah suatu perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain yang masih alami dan bersifat sementara, tanpa merusak atau mengotori lingkungan di daerah tersebut, tetapi ikut menjaga kualitas, keutuhan, dan kelestarian alam serta budaya dengan menjamin keberpihakan kepada masyarakat. Dan peranan masyarakat lokal sangat besar dalam upaya menjaga keutuhan alam. Peranan ini dilaksanakan mulai saat perencanaan, saat pelaksanaan pengembangan dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

Dari pengertian di atas ekowisata itu sendiri dibagi menjadi dua sisi pemahaman yaitu: Ekowisata dari segi konsep dan Ekowisata dari segi pasar.

a. Ekowisata dari Segi Konsep

Ekowisata merupakan pariwisata bertanggung jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami, serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (TIES—*The International Ecotourism Society* dengan sedikit modikasi). Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Ekowisata memiliki banyak definisi yang seluruhnya

berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting yaitu:

- Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman akan pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatankegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima.
- Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.
- Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal, untuk itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan).
- Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Dalam ekowisata, prinsip tanggung jawab dan menghormati alam dan budaya setempat menjadi sangat penting. Wisatawan harus menyesuaikan diri dengan budaya dan situasi setempat, bukan sebaliknya. Wisatawan juga harus menyadari pentingnya pelestarian lingkungan dan menghormati budaya dari kawasan yang dikunjunginya.

b. Ekowisata dari Segi Pasar

Kata ekowisata selalu mengacu pada bentuk kegiatan wisata yang mendukung pelestarian. Ekowisata semakin berkembang tidak hanya sebagai konsep tapi juga sebagai produk wisata (misalnya: paket wisata). Akhir-akhir ini, paket wisata dengan konsep "eko" atau "hijau" menjadi *trend* di pasar wisata. Konsep "kembali ke alam" cenderung dipilih oleh sebagian besar konsumen yang

mulai peduli akan langkah pelestarian dan keinginan untuk berpartisipasi pada daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Akomodasi, atraksi wisata maupun produk wisata lainnya yang menawarkan konsep kembali ke alam semakin diminati oleh pasar.

Ekowisata di Indonesia pada tahun 2002 adalah tahun dimana direncanakannya tahun ekowisata dan Pegunungan di Indonesia. Dari berbagai *workshop* dan diskusi yang diselenggarakan pada tahun tersebut diberbagai daerah di Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dirumuskan 5 (lima) Prinsip dasar pengembangan ekowisata di Indonesia yaitu: a.)Pelestarian, b.)Pendidikan, c.)Pariwisata, d.)Perekonomian,e.)Partisipasi masyarakat setempat.

a. Pelestarian

Prinsip kelestarian pada ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan budaya setempat. Salah satu cara menerapkan prinsip ini adalah dengan cara menggunakan sumber daya lokal yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Tak hanya masyarakat, tapi wisatawan juga harus menghormati dan turut serta dalam pelestarian alam dan budaya pada daerah yang dikunjunginya. Lebih baik lagi apabila pendapatan dari ekowisata dapat digunakan untuk kegiatan pelestarian di tingkat lokal. Misalnya dengan cara sekian persen dari keuntungan dikontribusikan untuk membeli tempat sampah dan membayar orang yang akan mengelola sampah.

b. Pendidikan

Kegiatan pariwisata yang dilakukan sebaiknya memberikan unsur pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan memberikan informasi menarik seperti nama dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar daerah wisata, dedaunan yang dipergunakan untuk obat atau

dalam kehidupan sehari-hari, atau kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Kegiatan pendidikan bagi wisatawan ini akan mendorong upaya pelestarian alam maupun budaya. Kegiatan ini dapat didukung oleh alat bantu seperti brosur, pamflet, buklet atau papan informasi.

c. Pariwisata

Pariwisata adalah aktivitas yang mengandung unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Ekowisata juga harus mengandung unsur ini. Oleh karena itu, produk dan, jasa pariwisata yang ada di daerah kita juga harus memberikan unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar.

d. Ekonomi

Ekowisata juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih lagi apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Ekowisata yang dijalankan harus memberikan pendapatan dan keuntungan (profit) sehingga dapat terus berkelanjutan. Untuk dapat mewujudkan hal itu, yang penting untuk dilakukan adalah memberikan pelayanan dan produk wisata terbaik dan berkualitas. Untuk dapat memberikan pelayanan dan produk wisata yang berkualitas, akan lebih baik apabila pendapatan dari pariwisata tidak hanya digunakan untuk kegiatan pelestarian di tingkat lokal tetapi juga membantu pengembangan pengetahuan masyarakat setempat, misalnya dengan pengembangan kemampuan melalui pelatihan demi meningkatkan jenis usaha atau atraksi yang disajikan ditingkat desa.

e. Partisipasi masyarakat setempat

Partisipasi masyarakat akan timbul, ketika alam atau budaya itu memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Agar bisa memberikan

manfaat maka alam atau budaya itu harus dikelola dan dijaga. Begitulah hubungan timbal balik antara atraksi wisata pengelolaan manfaat yang diperoleh dari ekowisata dan partisipasi. Partisipasi masyarakat penting bagi suksesnya ekowisata disuatu daerah tujuan wisata. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jangan terlalu berharap pemerintah akan melakukan semua hal karena kita juga memiliki peranan yang sama dalam melakukan pembangunan di daerah kita. Partisipasi dalam kegiatan pariwisata akan memberikan manfaat langsung bagi kita, baik untuk pelestarian alam dan ekonomi. Bila kita yang menjaga alam tetap lestari dan bersih, maka kita sendiri yang akan menikmati kelestarian alam tersebut, bila kita berperan dalam kegiatan pariwisata, maka kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya secara ekonomi.

2.6.2 Prinsip Ekowisata

Menurut Damayanti (2003), prinsip ekowisata menurut Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) antara lain :

1. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
2. Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat.
3. Memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat.
5. Memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan dan kepariwisataan.

Menurut garis besar pedoman pengembangan ekowisata Indonesia prinsip dan kriteria ekowisata adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Prinsip dan Kriteria Ekowisata

PRINSIP EKOWISATA	KRITERIA EKOWISATA
<p>1. Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, melaksanakan kaidah-kaidah usaha yang bertanggung jawab dan ekonomi berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan, melalui pelaksanaan sistem pemetaan (zonasi). • Mengelola jumlah pengunjung, sarana dan fasilitas sesuai dengan daya dukung lingkungan daerah tujuan. • Meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku terhadap lingkungan alam dan budaya. • Memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari dalam penyelenggaraan kegiatan ekowisata. • Meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan, dan bersifat ramah lingkungan. • Mengelola usaha secara sehat. • Menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya. • Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
<p>2. Pengembangan harus mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan atas dasar musyawarah dan pemufakatan masyarakat setempat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian dan perencanaan terpadu dalam pengembangan ekowisata. • Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata. • Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata. • Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bisa menerima atau menolak pengembangan ekowisata. • Menginformasikan secara jelas dan benar konsep dan tujuan pengembangan kawasan tersebut kepada masyarakat setempat. • Membuka kesempatan untuk melakukan

	<p>dialog dengan seluruh pihak yang terlibat (multi-stakeholders) dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.</p>
<p>3. Memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk membuka usaha ekowisata dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif. • Memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. • Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata. • Menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya.
<p>4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata. • Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak lainnya (multi-stakeholders) dalam penyusunan kode etik wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata. • Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/pemuka masyarakat setempat pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata. • Melakukan penelitian dan pengenalan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata.
<p>5. Memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan dan melaksanakan secara konsisten: Dokumen-dokumen Internasional yang mengikat (Agenda 21, Habitat Agenda, Sustainable Tourism, Bali Declaration dsb.). GBHN Pariwisata Berkelanjutan, Undang-undang dan peraturan-peraturan yang

	<p>berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun peraturan-peraturan baru yang diperlukan dan memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan lainnya yang telah ada sehingga secara keseluruhan membentuk sistem per-UU-an dan sistem hukum yang konsisten. • Memberlakukan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya secara konsekuen sesuai dengan ketentuan yang berlaku (law enforcement). • Membentuk kerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dilanggarnya peraturan yang berlaku.
--	---



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta: PT. Melton Putro.
- Astuti, Prestin. 2010. **Pengembangan Pariwisata Bahari Kabupaten Malang Jawa Timur (Studi Pada Kawasan Wisata Pantai Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**. Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Beding, Marcel. 1990. **Dampak Keapriwisataan Sebagai Misi Gereja**. Ekawarta.
- Dirawan, Gurfan Darma. 2003. **Analisis sosio-ekonomi dalam Pengembangan ekotourisme pada kawasan Suakamarga satwa mampie lampoko**. Diakses pada tanggal 15 April 2010.
- Erawan, I Nyoman. 1997. **Perencanaan Pariwisata Dalam Perekonomian Bali: Efek Penggandaan Pengeluaran Wisatawan Terhadap Pendapatan Masyarakat**. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid. 2010. **Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata**. Diakses pada tanggal 11 April 2010, pukul 13.39.
- Hakim, Luchman. 2004. **Dasar-Dasar Ekowisata**. Edisi pertama; Malang: Bayumedia Publisng.
- Hartono, Hari. 1994. **Perkembangan Pariwisata, Kesempatan Kerja dan Permasalahanya**. Prisma No. 1 Tahun ke III.
- Kusnadi. 2009. **Keberadayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir**. Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Mantra, ida bagoes. 2004. **Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Margono, 1999. **Metodologi Penelitian Pendidikan**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung dan Bahar. 2000. **Pengertian Pariwisata**. <http://arison001.blogspot.com/2008/02/pengertian-pariwisata.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2010
- Moleong, Lexy J., 2004. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musanef. 1995. **Manajemen Pariwisata di Indonesia**. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

- Nazir, M., 2003. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ngadiyon,. 1984. **Kelembagaan Dan Masyarakat**. Jakarta: Bina Aksara.
- Pendit, nyoman S. 1994. **Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prastiasih, Catur. 2005. **Dampak Pengembangan Obyek wisata Purwahamba Indah Terhadap kebudayaan Masyarakat Di Desa Purwahamba Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Geografi. Universitas Semarang.**
- Roslita, Neneng. 2000. **Alasan Mengembangkan Pariwisata**.
<http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=103>. Diakses tanggal 20 Maret 2010
- Satria, Arif. And Matsuda, Y. 2004. **Decentralization of Fisheries Management in Indonesia. Journal of Marine Policy**. Diakses pada tanggal 6 Maret 2010.
- Soedarsono. Prof., Dr., R.M. 1991. **Dampak Pariwisata Terhadap pengembangan Seni di Indonesia**. Institut Seni Indonesia. Yogyakarta.
- Spillane, James J. 1991. **Ekonomi Pariwisata, Sejarah Pariwisata dan Prospeknya**. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2007. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10.tahun 2009 Tentang kepariwisataan.** http://www.budpar.go.id/filedata/4636_1364-UUTentangKepariwisataaannet1.pdf. Diakses tanggal 6 Maret 2010
- Vredenbregt, Jacob. 1978. **Metode Teknik Penelitian Masyarakat**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Salah. 1992. **Pemasaran Pariwisata**. Jakarta: PT Prandnya Paramita.
- Wahyudin, Yudi. 2006. **Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir**. Diakses tanggal 6 Maret 2010
- Yoeti, Oka A. 1996. **Pengantar Ilmu Pariwisata**. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, Oka A. 1997. **Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata**. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yoeti, Oka A. 2008. **Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata**. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Obyek wisata Pantai Prigi dan Pasir Putih, yang terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Sedangkan waktu penelitian pada bulan Mei sampai Juni 2010.

3.2 Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian diperlukan untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik survey. Menurut Whitney dalam Nazir (2003), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat yang kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat erat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya Nazir (2003), menambahkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kualitatif ini menggambarkan tentang peran pemerintah dalam kaitannya dengan pariwisata daerah serta masyarakat pesisir di daerah tersebut. Sedangkan deskriptif kuantitatif berdasarkan data perhitungan dan angka-angka yang diperoleh yang akan menggambarkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dinilai.

Teknik survey adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial atau politik dari suatu kelompok

ataupun suatu daerah (Nazir, 2003). Van Dalam dalam Arikunto (2002), mengemukakan survei bukan hanya bermaksud mengetahui status gejala, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan.

3.3 Obyek Penelitian dan Jenis Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang tinggal di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, meliputi masyarakat yang mempunyai peranan dalam memanfaatkan Wisata Pantai Desa Tasikmadu dan dampak yang didapatkan oleh masyarakat pesisir di Desa Tasikmadu.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong 2004, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau, organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara funda-mental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar

hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2004).

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan berupa kata-kata dan bukan dalam angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan. Sedangkan tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2004).

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2004)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak yang diberikan dari obyek wisata Pantai Desa Tasikmadu yaitu; Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih terhadap masyarakat pesisir. Seperti mengkaji tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengelola pariwisata dan dampak reaksi yang timbul terhadap kebijakan tersebut dalam kenyataan di lapang. Dalam jenis deskriptif peneliti membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi

komparatif, sehingga tampak secara kasat mata, atau secara personal dapat ditangkap kerangka kerja, cara bertindak, dan tindakan mereka secara konkret. Dengan kata lain, dari pendekatan kualitatif ini dapat ditangkap atau diungkap aspek-aspek apa saja yang menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif yang didapat oleh masyarakat pesisir, dalam hal ini adalah Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih Desa Tasikmadu dengan wilayah Kecamatan Watulimo di Kabupaten Trenggalek.

3.4 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu masyarakat pesisir yang mempunyai peranan dalam memanfaatkan wisata pantai Desa Tasikmadu, oleh karena itu jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Sedangkan sampel menurut Hasan (2002) adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel bertujuan atau *Purposive Sample*. Sampel bertujuan ini dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena subyek yang diambil sebagai sampel merupakan subyek yang paling dominan terhadap populasi.

Menurut Arikunto (2002), syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sampel berdasarkan tujuan (*Purposive Sample*) adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi, yaitu

masyarakat pesisir Desa Tasikmadu yang mempunyai peranan dalam memanfaatkan disekitar Wisata Pantai Desa Tasikmadu.

- b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi. Dalam penelitian ini subyek yang dimaksud adalah dampak sosial dan lingkungan.
- c. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Adapun subyek yang akan dijadikan *purposive sample* adalah:

1. Masyarakat pesisir yang beraktifitas di daerah Wisata Pantai Desa Tasikmadu.
2. Masyarakat pesisir yang berperan dalam pengelolaan kawasan pantai.
3. Dinas Pariwisata tentang perannya terhadap pengelolaan pariwisata baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan tentang perannya terhadap konservasi Pantai Desa Tasikmadu.
5. Polisi Perairan tentang perannya yang mengawasi keadaan pantai dan para pengunjung yang merusak kawasan wisata.
6. Para pengunjung yang datang ke Wisata Pantai Desa Tasikmadu.
7. Kepala UPT (Unit Pelaksana Tugas) Pantai Desa Tasikmadu dengan stafnya tentang aktifitas atau kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan.
8. Kepala UPT. Hotel Prigi tentang perannya sebagai pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam kegiatan di Hotel Prigi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan

tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian (Arikunto, 1998).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya (Suryabrata, 1993). Data primer ini diperoleh dengan:

1. Observasi, merupakan suatu (pengamatan dan pencatatan) secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan datanya dilakukan secara langsung pada obyek yang diselidiki (Margono, 1999). Menurut Widayat dan Amirullah (2002) dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Observer tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau berkomunikasi dengan yang diobservasi. Informasi hanya dicatat berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi atau dari catatan kejadian masa lalu. Metode observasi dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, tersembunyi atau terang-terangan.

Observasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian ini seperti survey keadaan lapang dan melihat kegiatan apa saja yang ada di obyek wisata yang ada.

2. Wawancara, merupakan metode yang memberi pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari responden (Widayat dan Amirullah, 2002). Tipe wawancara

disini adalah interview bebas terpimpin, dimana pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jenis data primer ini adalah sebagai berikut: Kondisi masyarakat pesisir dan perilaku masyarakat setempat dalam memanfaatkan wisata Pantai dan upaya pelestarian pantai oleh masyarakat, serta peran lembaga sosial setempat, peran dari Pemerintah setempat mengenai wisata pantai dan ekowisata yang ada, peran dari polisi perairan yang berada di sekitar kawasan wisata.

3. Dokumentasi, Menurut Arikunto (1998) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002).

b. Data Sekunder

Menurut Singarimbun dan Effendi (1982), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002).

Jenis-jenis dokumen yang digunakan pada penelitan ini antara lain dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta keadaan penduduk di daerah setempat atau masyarakat pesisir.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat (Mantra, 2004). Diusahakan untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu kolektivitas dengan syarat bahwa representativitas harus terjamin. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis atau antropologis dapat tercapai. Klasifikasi yang dipakai bertujuan untuk menyederhanakan realitas sosial yang kompleks sehingga dapat ditangkap bagi suatu analisa yang lebih lanjut. Secara populer dapat dikatakan bahwa klasifikasi bertujuan untuk mencapai penertiban yang analitis dalam gejala-gejala sosial yang kompleks.

Pada hakekatnya mencoba untuk menempatkan realitas sosial yang diteliti ke dalam konsep-konsep yang telah diperkembangkan oleh sosiolog dan antropolog, lagi pula jika perlu kita menciptakan konsep-konsep yang baru kalau ternyata bahwa realitas sosial tertentu kurang tepat disifatkan oleh konsep-konsep yang telah ada. Jadi penelitian deskriptif memanfaatkan, maupun menciptakan, konsep-konsep ilmiah, sekaligus pula berfungsi dalam mengadakan suatu klasifikasi mengenai gejala-gejala sosial yang dipersoalkan (Vredenburg, 1978).

Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisa. Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena sosial atau alami tertentu. Untuk mencapai tujuan pokok ini peneliti merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, memproses data, membuat analisa dan interpretasi. Setelah data dikumpulkan maka tahap berikut

ialah mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diadakan suatu analisa (Sugiyono, 2007).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2007).

Setelah data dianalisa dan informasi yang lebih sederhana diperoleh, hasil-hasilnya harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian. Interpretasi atau inferensi ini dilakukan dengan dua cara. Pertama interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Ini adalah interpretasi dalam pengertian sempit, tetapi yang paling sering dilakukan. Peneliti secara otomatis membuat interpretasi sewaktu menganalisa data. Disini analisa dan interpretasi sangat erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan (Sugiyono, 2007).

3.7 Batasan Masalah Penelitian

Dalam melakukan penelitian (*research*), perlu untuk menentukan batasan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi fokus, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Subyek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan erat hubungannya dengan permasalahan yang ditetapkan yaitu tentang dampak terhadap masyarakat pesisir baik secara sosial dan juga lingkungannya.
2. Obyek penelitian ini adalah masyarakat pesisir Desa Tasikmadu yang mempunyai peranan dalam memanfaatkan disekitar wisata Pantai Prigi dan Pasir Putih, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
3. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak sosial lingkungan terhadap masyarakat dari obyek wisata tersebut.
4. Strategi apa yang dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif yang telah terjadi.

3.8 Keabsahan Data

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai di sini ialah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama. Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan

beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2004).

Untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh diperlukan beberapa teknik, adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan ke ikut sertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi: membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, dan juga akan membatasi kekeliruan (biases) peneliti, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.
2. Keajegan Pengamatan, berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagi pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat

melakukannya dengan jalan: mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

4. pemeriksaan sejawat merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Jika hal itu dilakukan maka hasilnya adalah: menyediakan pandangan kritis, menguji hipotesis kerja (temuan-teori substantif), membantu mengembangkan langkah berikutnya, melayani sebagai pembanding (Moleong, 2004).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Obyek Wisata

4.1.1 Kondisi Geo dan Topografis Kabupaten Trenggalek

Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Trenggalek kota. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa. Kabupaten trenggalek berada di peisisir selatan jawa timur, ±180 km arah barat daya surabaya, terletak pada koordinat 7° 53 - 8° 34 LS dan 111° 24 samapai 112° 11 BT dengan luas total ±1.261 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah selatan : Samudra Hindia
- Sebelah barat : Kabupaten Pacitan

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek 126.140 Ha, secara topografi sebagian besar wilayahnya (2/3 bagian) merupakan dataran tinggi dan sebagian kecil (1/3 bagian) lainnya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian tanah berkisar antara 0 sampai dengan 1.500 m dari permukaan laut. Tinggi dari permukaan air laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek adalah sekitar ±150–450 m terdapat pada Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo bagian tengah, Kampak bagian Timur, Gandusari, Karang Barat Daya dan sebagian Kecamatan Bendungan. Peta Kabupaten Trenggalek dan lokasi penelitian disajikan pada gambar dibawah ini:

kecamatan Munjungan dan Watulimo, sedangkan kemiringan lebih dari 25 % terdapat di Kecamatan Pule.

Iklim yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah musim penghujan dan musim kemarau, yang terbagi menjadi 6 (enam) bulan musim penghujan yaitu bulan Oktober-Maret dan 6 (enam) bulan musim kemarau yaitu bulan April-September.

Wilayah pesisir Trenggalek membentang sepanjang ± 96 km dan sebagian besar membentuk teluk, seperti Teluk Prigi (Kecamatan Watulimo), Teluk Panggul (kecamatan Panggul) dan Teluk Sumbreng (Kecamatan Munjungan). Dimana diantara ketiganya, kawasan Teluk Prigi yang paling pesat perkembangan perikanan tangkapnya yang ditunjang dengan beragam sarana prasarana.

4.1.2 Keadaan Geografi dan Topografi Kecamatan Watulimo

Kecamatan Watulimo, terletak pada $111^{\circ} - 112^{\circ}$ BT dan $7^{\circ} - 8^{\circ}$ LS, secara administratif berbatasan memiliki batasan wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak dan Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Timur : Kecamatan Besuki-Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Kampak

Kecamatan dengan luas ± 15.444 ha (terluas kedua setelah munjungan) ini terdiri dari 12 desa yakni Tasikmadu, Karanggandu, Prigi, Margomulyo, Sawahan, Watulimo, Dukuh, Slawe, Gemaharjo, Pakel dan Watuagung.

Kecamatan Watulimo merupakan daerah berbukit, berada pada ketinggian 5 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut (DPL), dengan kemiringan $> 40\%$. Sumberdaya hutan merupakan potensi dominan bagi penduduk setempat mencapai areal ± 13.000 ha. Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang mengalir ke wilayah Teluk Prigi mencapai tangkapan (*catchment*) sekitar \pm 11.041 ha dari wilayah Watulimo. Masalah utama di daerah ini adalah erosi dan lahan kritis. Kegiatan penduduk pada wilayah dataran rendah adalah nelayan dan pariwisata. Sedangkan pada daerah yang lebih tinggi, usaha lahan kering dan kehutanan merupakan bagian dari kegiatan penduduk. Sektor unggulan yang dikembangkan untuk daerah ini adalah pariwisata dan perikanan laut.

Teluk Prigi yang ada di Kecamatan Watulimo mempunyai 3 (tiga) pantai, yaitu Pantai Damas di Desa Karanggandu, Pantai Prigi di Desa Tasikmadu, dan Pantai Karanggongso termasuk Pasir Putih terletak di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu. Panjang total garis Pantai Prigi mencapai \pm 25,6 km, dengan garis pantai landai sepanjang 11,15 km dan sisanya (14,45) adalah tepian yang curam yang saat ini sudah mengalami abrasi dan kikisan air laut.

4.1.3 Keadaan Geografi dan Topografi Desa Tasikmadu

Desa Tasikmadu terletak pada koordinat $8^{\circ}17'43'' - 8^{\circ}24'25''$ LS dan $111^{\circ}43'08''$ sampai $111^{\circ}45'08''$ BT. Secara administratif Desa Tasikmadu memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki-Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Desa Prigi
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Luas wilayah Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha, yang terdiri dari 3 dusun yakni Ketawang, Gares dan Karanggongso, 6 RW dan 37 RT. Ketinggian tempat 6 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan curah hujan rata-rata 2.110 mm/tahun. Jenis tanah dari ordo tanah entisol berjenis rigosol, alluvia pasir dan litosol. Kawasan Tasikmadu dialiri 2 (dua) sungai yang mengalir sepanjang tahun yang digunakan untuk irigasi.

Jarak ke ibukota kecamatan hanya 2 km dengan waktu tempuh 10 menit dan jarak ke ibukota kabupaten 42 km dengan waktu tempuh 1,5 jam. Desa Tasikmadu memiliki dermaga dan pelabuhan perikanan. Secara umum, kondisi topografi Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian 3 m DPL (diatas permukaan laut). Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati dan terdapat area persawahan yang cukup luas di bagian utara desa. Tabel 2 dibawah ini menunjukkan penggunaan lahan di Desa Tasikmadu:

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Desa Tasikmadu

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (ha)
1.	Pemukiman Penduduk	112.582
2.	Pertanian Sawah	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sawah setengah teknis • Sawah tadah hujan 	27.225 20.557
3.	ladang/tegalan	56.290
4.	Hutan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan lindung • Hutan Produksi 	249,56 2.349.073
5.	Bangunan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Perkantoran • Sekolah • Pasar • Jalan 	0,188 0,535 0,117 11,5
	Rekreasi dan Olahraga	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan dan sepak bola • Lapangan bola volley • Taman Rekreasi 	1,5 1 1
7.	Lain-lain	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaman 	2,616
Jumlah		1.845.743

Sumber : Profil Desa Tasikmadu, Tahun 2009

4.2 Keadaan Penduduk Desa Tasikmadu

Desa Tasikmadu, jumlah penduduknya pada tahun 2009 sebanyak 10.378 jiwa yang terdiri dari 5.135 penduduk laki-laki dan 5.243 penduduk perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.760. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk di Desa Tasikmadu berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Orang	Presentase (%)
1.	Usia 10 tahun ke atas yang buta huruf	9	0,10
2.	Tidak tamat SD / sederajat	78	0,88
3.	Tamat SD / sederajat	3.255	36,80
4.	Tamat SLTP / sederajat	2.803	31,69
5.	Tamat SLTA / sederajat	2.582	29,19
6.	Tamat D-1	4	0,05
7.	Tamat D-2	5	0,06
8.	Tamat D-3	9	0,10
9.	Tamat S-1	97	1,10
10.	Tamat S-2	2	0,02
11.	Tamat S-3	1	0,01
Total		8.845	100

Sumber : Profil Desa Tasikmadu, Tahun 2009

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tasikmadu cukup sadar dengan pentingnya pendidikan, hal ini dapat dilihat pada prosentasi penduduk yang mengenyam pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun mencapai 68,49%, meskipun demikian hal ini harus terus diupayakan agar pendidikan masyarakat kawasan ini lebih baik.

Mata pencaharian penduduk Desa Tasikmadu bervariasi dan nelayan bukan menjadi profesi dominan, meskipun merupakan desa pesisir. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Tasikmadu juga berprofesi sebagai petani baik pemilik, penggarap maupun buruh tani pada saat musim tanam dan menjadi nelayan pada saat musim ikan. Selain menjadi ABK (istilah lokal *ngadim*) mata pencaharian masyarakat kawasan ini adalah kuli angkut maupun bakul.

Dan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 5.922 jiwa. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Status	Jumlah/ Orang
1.	Petani	5.922
2.	Pekerja di sektor jasa/perdagangan	481
3.	Pekerja di sektor industri	597
Jumlah		7.000

Sumber : Profil Desa Tasikmadu, Tahun 2009

4.2.1 Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian Desa Tasikmadu.

Sarana dan prasarana penunjang perekonomian di Kecamatan Watulimo termasuk Desa Tasikmadu cukup lengkap, seperti jalan, telekomunikasi, fasilitas air, jaringan listrik, SPBU, pasar dan toko, Kantor Pos dan Hotel, mengingat Wisata Pantai Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo merupakan daerah tujuan wisata pantai utama di Kabupaten Trenggalek.

Jalan, jenis jalan yang melintasi kawasan ini adalah jalan propinsi sepanjang 16,5 km, jalan kabupaten sepanjang 47,5 km dan jalan desa sepanjang 63,3 km. Melihat jalan tersebut, maka jalan yang ada dapat dilewati kendaraan roda empat sepanjang tahun. Selain itu, Pemerintah Propinsi Jawa Timur sedang membangun Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintasi Pacitan sampai Banyuwangi. Pembangunan JLS ruas Trenggalek-Malang ini sebagai upaya pengembangan potensi perekonomian diempat wilayah yakni Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Tujuan spesifiknya adalah:

1. Memberikan akseibilitas agar potensi yang ada di wilayah selatan dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Menunjang peningkatan sektor-sektor pembangunan lainnya seperti pariwisata, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan lain-lain.

3. Membangun sistem jaringan jalan yang menghubungkan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah dan Lintas Utara Jawa-Bali dalam rangka pengembangan wilayah.

Wilayah kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang dilintasi Jalur Lintang Selatan (JLS) sepanjang 76,62 km adalah Panggul, Dongko, Karang, Pogalan, Munjungan, Kampak dan Watulimo.

Telekomunikasi, fasilitas telekomunikasi berupa telepon otomatis sudah menjangkau semua kalangan baik perkantoran maupun rumah tangga. Hal ini ditunjang dengan adanya 1 unit kartor pembantu Telkom yang terletak di Desa Prigi guna memberikan pelayanan penyambungan dan pembayaran telepon. Saat ini jaringan telepon di Watulimo sudah penuh. Telepon seluler (*Handphone*) dari semua operator juga dapat dioperasikan di wilayah Desa Tasikmadu dan Dusun Karanggandu.

Fasilitas Air, Fasilitas air tawar berupa sumur artesis dengan kedalaman sekitar 90 meter dan kapasitas tangki 70 ton yang dimiliki dan dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) Cabang Prigi. Fasilitas ini memberikan pelayanan penyaluran air tawar dengan volume 70 ton/hari kepada pelanggannya diantaranya waserda milik PPN Prigi sebelah barat, waserda milik Perum PPS Cabang Prigi- serta PT. Prima Indobahari Sentosa. Selain itu PPN Prigi sejak tahun 2008 juga memberikan fasilitas air tawar berupa sumur artesis dengan kapasitas tangki 20 ton. Fasilitas tersebut memberikan pelayanan penyaluran air tawar kepada pelanggan diantaranya waserda sebelah timur kantor PPN Prigi dengan volume rata-rata 167 ton per bulan serta digunakan untuk keperluan kantor PPN Prigi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air tawar bagi awak kapal yang melaut, para nelayan membawa persediaan sendiri berupa air mineral dalam galon.

Jaringan listrik yang tersedia di kawasan ini mampu memenuhi kebutuhan listrik penduduk. Sarana kelistrikan yang ada adalah gardu induk 1 unit, dengan cut out (CO) 20 KV sebanyak 14 set, GTT 2 tiang sebanyak 42 set, dan GTT 1 tiang sebanyak 13 set. Khusus untuk wilayah pelabuhan, mempunyai CO di dekat TPI sebanyak 1 set yang menyalurkan daya listrik ke sekitar TPI dan Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu. Selain itu, tersedia jaringan listrik di PPN Prigi berkapasitas 250 KVA. Pada TA 2002 melalui dana LOAN jaringan listrik untuk PPN Prigi diberi tambahan daya induk sebesar 13,2 KVA dari kapasitas sebelumnya 213,3 KVA. Jaringan ini selain digunakan untuk kebutuhan pabrik es, bengkel, *cold storage* dan perkantoran juga digunakan sebagai penerangan jalan dan perumahan.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terletak di Desa Tasikmadu, untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor baik umum maupun pribadi. Kebutuhan BBM untuk melaut diperoleh melalui SPBU, SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) dan pedagang kecil. Dari Tabel 5 di bawah dapat diketahui bahwa total kebutuhan BBM pada tahun 2009 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2008. Diantara empat jenis bahan bakar tersebut, solar mendominasi kebutuhan BBM.

Tabel 5. Kebutuhan BBM Armada Perikanan di Kawasan Prigi

NO	JENIS	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Solar	2.098	2.815	3.008	4.443	2.705
2.	Oli	77	101	99	103	105
3.	Bensin	527	794	901	1.473	926
4.	Minyak Tanah	157	138	103	70	80
	JUMLAH	2.859	3.848	4.111	6.089	3.816

Sumber: Profil Desa Tasikmadu, 2009

Pasar di Desa Tasikmadu merupakan pasar terbesar di Watulimo yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan maupun sandang. Selain itu

juga terdapat beberapa swalayan dengan sistem waralaba seperti indomaret dan Alfamart, swalayan milik perorangan, kedai pesisir, toko kelontong dan warung serba ada di Desa Prigi dan Tasikmadu yang juga menyediakan kebutuhan rumah tangga.

Kantor Pos berada di Desa Tasikmadu, merupakan fasilitas yang membantu masyarakat sekitar untuk mengirimkan berbagai paket kiriman baik surat pribadi, surat penting, uang maupun barang tanpa harus ke Kota Trenggalek yang jaraknya cukup jauh (sekitar 45 km).

Hotel Prigi terletak di Desa Tasikmadu dekat dengan Pantai Prigi, merupakan fasilitas yang dikelola PEMKAB (Pemerintah Kabupaten) Trenggalek berupa penginapan dan tempat pertemuan untuk para wisatawan yang datang ke kawasan Wisata Pantai Prigi. Selain itu di Dusun Karanggongso terdapat Hotel Logano dan Pondok Prigi yang menyediakan sarana menginap dan tempat pertemuan.

Desa yang berjarak sekitar 44 Km dari Kota Trenggalek dihubungkan dengan sarana jalan yang cukup baik Selain itu tersedia jaringan listrik, PDAM dan PUSKESMAS Pembantu 1 unit. Sarana transportasi untuk mencapai Desa Tasikmadu cukup baik dan telah dilalui angkutan reguler selama 18 jam sehari. Selain sarana jalan dan transportasi, desa ini mempunyai fasilitas telekomunikasi berupa Satuan Telepon Otomatis (STO) yang menjangkau semua wilayah pesisir, sehingga komunikasi melalui telepon biasa maupun seluler sudah dapat dilakukan. Hal ini diharapkan dapat mendukung minat para investor yang akan menanamkan investasinya di kawasan ini khususnya wilayah pesisir Watulimo. Tabel di bawah ini merupakan keadaan dari saran dan prasara yang ada di Desa Tasikmadu:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Desa Tasikmadu

NO	PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jalan dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> Jalan Kabupaten Jalan Desa Jembatan 	- - -	Baik Rusak Baik
2.	Kendaraan Umum <ul style="list-style-type: none"> Roda 4 Roda 3 Roda 2 Perahu Perahu Tempel 	- - - - -	Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada
3.	Sarana Keuangan <ul style="list-style-type: none"> Bank Usaha Bersama Kelompok Simpan Pinjam Badan Kredil Desa 	1 1 3 1	- - - -
4.	Pasar dan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Pasar Desa Pasar Swalayan Kios perorangan Toko Warung Serba Ada 	1 1 120 10 1	- - - - -
5.	Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> Masjid Langgar/surau 	11 19	Baik Baik
6.	Prasarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> Lapangan Sepak Bola Lapangan Volley Lapangan Buiu Tangkis Lapangan Tenis Kolam Renang 	1 3 1 2 1	- - - - -
7.	Koperasi <ul style="list-style-type: none"> Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Desa 	3 1	-

8.	Lain-lain		
	• PLN	-	-
	• PAM	-	-
	• SumurGali	1.203	-
	• Perpipaan	1	-
	• Mata Air	8	-
	• Bak Sampah	1	-
	• Gerobak Sampah	1	-
	• SPAL	1	-
	• Puskesmas Pembantu	1	-
	• Taman Bacaan	1	-

Sumber: Profil Desa Tasikmadu, 2009

Selain itu, Desa Tasikmadu mempunyai fasilitas utama bagi sektor perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, yang mempunyai fasilitas: kolam labuh, *breakwater*, dermaga, jalan lingkungan, revetmen, pabrik es sebanyak 2 buah dengan kapasitas 5.809 ton es/tahun; instalasi air tawar, bengkel, jaringan listrik PLN, lampu suar maupun gudang. Selain itu terdapat *cold storage* 4 unit dengan kapasitas 240 ton, pabrik tepung ikan dengan kapasitas 2.024 ton/tahun, 2 TPI yakni TPI sebelah barat untuk perahu >10 GT dan TPI timur untuk perahu <10 GT dan SPBU khusus kapal. Sarana pelabuhan ini menjadi pengungkit perekonomian masyarakat yang ada dikawasan Teluk Prigi. Selain pelabuhan juga terdapat Balai Benih Udang Galah (BBUG) yang menjadi penyedia benih udang galah untuk kawasan Jawa Timur. Fasilitas pendidikan tersedia cukup lengkap mulai SD sampai SMA.

4.2 Profil Sumber Daya Alam (SDA) wisata yang ada di wisata Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih

Di kabupaten Trenggalek mempunyai banyak potensi wisata, baik wisata alam, buatan dan wisata budaya yang dapat dikunjungi, di bawah ini adalah macam-macam potensi wisata yang ada di Trenggalek:

Tabel 7. Potensi wisata Di Trenggalek

No.	Jenis Wisata	Nama Obyek Wisata	Tempat / Kecamatan	Sudah / belum Dikembangkan
1.	Pantai	Pantai Prigi	Watulimo	Sudah
		Pantai Cengkong	Watulimo	Sedang
		Pantai Karanggonso	Watulimo	Sudah
		Pantai Damas	Watulimo	Sudah
		Pantai Pelang	Panggul	Sudah
		Pantai Bladu	Munjungan	Sedang
		Pantai Ngampiran	Munjungan	Sedang
		Pantai Ngadipuro	Munjungan	Sedang
		Pantai Konang	Panggul	Belum
		Pantai Jokerto	Panggul	Belum
2.	Goa	Goa Lowo	Watulimo	Sudah
		Goa Suruban	Watulimo	Belum
		Goa Ngerit	Kampak	Belum
		Goa Timahan	Kampak	Belum
		Goa Gajah	Bendungan	Belum
		Goa Kalimati	Dongko	Belum
		Goa Pringapus	Dongko	Belum
		Goa Pelang	Panggul	Belum
		Goa Sriti	Pule	Belum
		Goa Banyu Mas	Watulimo	Belum
3.	Hutan / Alam Buatan	Air Terjun Songgolangit	Pule	Belum
		Air Terjun Kalianjok	Tugu	Belum
		Air Terjun Jero Guih	Suruh	Belum
		Air Terjun Pantai Pelang	Panggul	Sudah
		Pemandian Tapan	Karangan	Sudah
		Kolam Renang Tirta Jwalita	Trenggalek	Sudah
		Telaga Beji Maron	Gandusari	Belum
		Panjat Tebing Gng Sepikul	Watulimo	sudah
		Gunung Linggo	Suruh	Sudah

4.	Budaya / Adat	Upacara adat:		
		Sembonyo / labuh Laut	Watulimo	Sudah
		Longkangan	Munjungan	Sudah
		Bersih DAM Bagong	Trenggalek	Sudah
		Kupatan	Durenan	Sudah
		Hari Jadi Trenggalek	Trenggalek	Sudah
		Kesenian:		
		Turonggo Yakso	Tersebar	Sudah
		Jaranan Senterewe	Tersebar	Sudah
		Tiban	Tersebar	Sudah
		Campursari	Tersebar	Sudah
		Wayang Kulit	Tersebar	Sudah
		Tayub	Tersebar	Sudah

Sumber : Laporan akhir pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek

Keterangan:

Sudah : Sudah adanya penanganan atau pengembangan dari pemerintah.

Sedang : Sedang dilakukannya pengembangan Dari Pemerintah.

Belum : Belum adanya sentuhan atau pengembangan dari Pemerintah.

a. Pantai Prigi

Pantai Prigi atau Teluk prigi yang biasa disebut terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo sekitar 48 km arah selatan kota Trenggalek.

Pantai Prigi merupakan wisata alam yang indah dan juga banyak pengunjungnya. Pantai Prigi ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti:

a. Tempat parkir

Untuk kendaraan pribadi disediakan tempat parkir di sekitar lokasi obyek wisata. Areal parkir ini juga sangat tidak nyaman, karena tidak ada penjagaan (kurangnya SDM) bagi kendaraan yang sedang parkir. Selain itu pengunjung juga tidak dilarang untuk parkir di areal wisata, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah areal parker Pantai Prigi dan Pasir Putih:



Gambar 3. Areal Parkir Pantai Prigi



Gambar 4. Areal Parkir Pasir Putih

b. Hotel

Diperlukan bagi pengunjung yang ingin berwisata lebih lama sebagai tempat penginapan tau beristirahat. Dibawah ini adalah gambar hotel yang ada di Prigi:



Gambar 5. Hotel Prigi

Hotel Prigi yang ada di sekitar Wisata Pantai prigi ini mempunyai 27 kamar dengan fasilitas yang berbeda-beda. Fasilitas yang memadai sesuai budget yang dikeluarkan, adapun fasilitas yang disediakan: Kipas Angin, AC, TV, Telepon, Ruang Tamu, Ruang makan, Air Panas, Parkir, *Meeting Room*, Restoran. Untuk harga yang termurah Rp. 90.000,- per hari dan termahal Rp. 300.000,- per hari.

c. Rumah makan

Menyediakan makanan khas pesisir yang menggugah selera dengan didukung oleh tempat yang nyaman bernuansakan pantai. Dibawah ini adalah gambar rumah makan atau kios yang ada di kawasan Pantai Prigi:



Gambar 6. Warung Makan pantai Prigi

d. Masjid dan musholla

Terdapat masjid dan musholla yang berada didekat Pantai prigi sebagai tempat beribadah bagi umat muslim.



Gambar 7. Mushollah Pantai Prigi

e. Souvenir shop

Menyediakan cinderamata khas Trenggalek dan Jawa Timur mulai dari pernak-pernik hiasan, pakaian, topi, dan juga benda-benda unik khas daerah seperti angklung dan lain-lain. Dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 8. Souvenir Shop pada obyek wisata Pantai Prigi

Di Pantai Prigi pada saat sudah memasuki musim ikan, biasanya ada kegiatan yang dilakukan oleh para wanita atau ibu-ibu yang merupakan penduduk asli daerah setempat, sedang melakukan kegiatan menarik jaring, yang biasa dilakukan untuk jam pagi sekitar jam 07.00 dan selesai sampai jam 12.00, dan jam siang pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00, dan itu juga merupakan daya tarik sendiri bagi wisatawan, sehingga wisatawan dapat ikut melakukan kegiatan tersebut dan juga membantu para ibu-ibu yang sedang menarik jaring. Dibawah ini dapat dilihat para ibu-ibu penarik jaring:



Gambar 9. Kegiatan Narik Jaring Pada Obyek wisata Pantai Prigi

Di Pantai Prigi ini masyarakat pesisirnya yang beraktifitas dalam kawasan Pantai banyak yang merupakan pendatang dari luar kota, sehingga kesadaran akan kebersihan lingkungan dan pengawasan akan sarana dan prasarana yang ada disekitar pantai juga kurang. Dulu menurut Ibu Tuti yang berasal dari Jember, penjual warung makanan disekitar wisata sejak tahun 1980:

“Dulu ada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), tetapi lambat laun sampai sekarang kelompok pokdarwis ini lama-lama tak terlaksana sehingga daerah pantai ini terlihat kotor dan banyak sampah. Untuk kebersihan pantai sekarang dilakukan oleh pelaksana yang ada di Pantai Prigi dan diadakanya pada hari jumat disebut dengan Jumat Bersih”

Begitu juga yang dikatakan oleh pak pelaksana pada saat kegiatan Jumat Bersih berlangsung dan dibawah ini dapat dilihat kegiatan Jumat bersih:

“Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam Seminggu sekali, sehingga kebersihannya juga kurang. Dan masyarakat pesisir yang berjualan disini kebanyakan pendatang, jadi kurang sadarnya akan lingkungan yang ada di sekitar pantai ini.”



Gambar 10. Kegiatan Jumat Bersih Pada Obyek wisata Pantai Prigi

Pantai prigi ini mempunyai ruko-ruko yang berada pada area parkir kawasan pantai, tetapi ruko-ruko itu tidak berjalan efektif dikarenakan dari masyarakat pesisir yang mata pencahariannya berjualan disekitar kawasan pantai ini merasa pendapatan yang mereka dapatkan menurun, dikarenakan keberadaan tata letak ruko yang tidak strategis. Untuk sementara ruko yang

diberikan oleh pemerintah mereka sewakan atau dikontrakan sebesar Rp.50.000,- per bulan dan pindah kedalam kawasan pantai. Di kawasan dalam pantai mereka tidak dipungut biaya dan suasana atau pendapatan mereka yang didapat lebih banyak dibandingkan dengan mereka bertempat pada ruko-ruko di kawasan parkir pantai. Di bawah ini adalah ruko-ruko yang tidak terpakai:



Gambar 11. Ruko-ruko di Kawasan Pantai Prigi

Di kawasan wisata Pantai Prigi diadakannya upacara tradisional *Larung Sembonyo* digelar oleh para nelayan setempat setiap pada bulan Selo jatuh pada hari pasaran kliwon penanggalan jawa. *Larung sembonyo* atau dikatakan sedekah laut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat nelayan dan sekaligus peringatan pernikahan Raden Temenggung Yudha Negara seorang kepala Prajurit Mataram dengan Putri Gambar Inten. Raden Temenggung Yudha Negara yang nama kecil atau aslinya Raden

Kramadipa berhasil membuka Kawasan Teluk Prigi dengan jaminan bersedia menikahi Putri Gambar Inten salah seorang Putri Adipati Andong Biru. Mitos masyarakat Prigi, Kecamatan Watulimo, tentang terciptanya kawasan teluk Prigi merupakan sejarah awal adanya upacara *Larung Sembonyo*. Meskipun masyarakat Prigi hampir seluruhnya beragama Islam, namun mereka merasa kurang tentram hidupnya bila meninggalkan tradisi dan upacara Sembonyo yang mereka yakini bisa menjaga keseimbangan dengan alam sekitar serta alam semesta.

Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat nelayan dan petani berkaitan dengan mata pencaharian sebagai nelayan, petani serta merupakan sarana unruk menghormati leluhurnya yang berjasa dalam membuka kawasan teluk Prigi. Mereka tidak ingin melupakan jasa Tumenggung Yudha Negara sebagai pahlawan sekaligus sebagai pendiri desa Tawang, Tasikmadu. Jika mereka melalaikan khawatir ada gangguan, sulit dalam penangkapan ikan, panen pertanian gagal, timbul wabah, bencana alam dan sebagainya.

Penyelenggaraan Sembonyo setiap tahun didanai oleh Pemkab Trenggalek dalam rangka promosi wisata. Upacara Sembonyo penuh syarat-syarat yang harus ada dengan beraneka ragam larangan. Hal ini merupakan cermin watak masyarakat Prigi, khususnya masyarakat nelayan yang membutuhkan ketekunan, ketabahan dan keberanian menantang maut, yang mengintai setiap saat. Laut ladangnya, laut tempat rejekinya. Dibawah ini dapat dilihat gambar kegiatan upacara *Larung Sembonyo*:



Gambar 12. Upacara Kegiatan Larung Sembonyo

Di daerah kawasan pantai terdapat usaha perikanan baik pengolahan, Pelabuhan Nusantara, TPI, *cold store*, balai benih udang galah, balai pertemuan nelayan, serta kawasan sentralisasi hasil perikanan Bengkorok.

Tabel 8. Karakteristik dan Potensi Obyek Wisata

Pantai Prigi		
1.	Lingkup Administratif	Desa Tasikmadu – Kecamatan watulimo
2.	Luas Pantai	± 5 Ha
3.	Panjang Pantai	± 2 Km
4.	Orientasi Lokasi	± 48 Km arah selatan kota Trenggalek
5.	Pencapaian atau Akses	Jalan yang dilalui sebagian besar sudah beraspal hotmix dengan kondisi baik dan sebagian sedang. Pencapaian dari arah kota Trenggalek dan Tulungagung melalui IKK Bandung (Kab. Tulungagung). Selanjutnya dari IKK Bandung menempuh jarak ± 18 Km menuju Kec. Watulimo (pantai).
6.	Moda Transportasi Umum	Semua jenis kendaraan (sepeda motor, mobil, dan bis) dapat mencapai ke lokasi. MPU jenis colt / bison tersedia mulai dari simpang tiga Durenan (jalan propinsi). Dari terminal kota Trenggalek menggunakan mini bus kode X (jurusan Trenggalek–Durenan–Bandung-Watulimo).
7.	Pengelola	Pemkab Trenggalek dibawah DISPORAPARIBUD
8.	Harga KTM	Rp. 3000,-
9.	Penggunaan Lahan	Kawasan Terbangun:

		<p>Dibedakan menjadi 2, yaitu kawasan di sekitar pintu gerbang utama dan sepanjang pantai dengan linier mengikuti garis pantai dan jalan. Kawasan terbangun terdiri dari badan jalan, sarana fasilitas pendukung, lahan parkir dan utilitas.</p> <p>Kawasan tidak terbangun: Berupa hutan campuran yang menyebar disekitar lokasi.</p>
10.	Kegiatan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Berenang atau bermain air - Berkemah dan Olah Raga - Permainan anak-anak (playground) - Interaksi dengan nelayan - Belanja ikan segar
11.	Wisata Pendukung	Terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara terbesar di pantai selatan Jawa dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
12.	Fasilitas dan Utilitas	<p>Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Prigi dengan fasilitas sekelas melati tiga - Lahan Parkir Luas - Bumi perkemahan - Sarana olah raga - Rumah makan, warung dan kios <p>Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MCK / toilet umum - Listrik - Air bersih - Areal jaringan Wireless phone (HP)
13.	Kegiatan Khusus	Upacara tradisional Larung Sembonyo Diadakan para nelayan setempat setiap bulan selo pada hari pasaran kliwon penanggalan Jawa. Dapat juga dikatakan dengan sedekah laut.
14.	Potensi Atau Daya Tarik Wisata	Prigi adalah pantai yang landai dengan fasilitas lengkap, daya tarik utama terdapat pada kegiatan atau atraksi nelayan menarik jaring dan berbelanja ikan segar di tempat pelelangan ikan di dermaga nusantara. Selain itu prigi sangat menyenangkan untuk wisata bersama keluarga dan kelompok untuk menikmati keindahan pulau-pulau kecil dan bermain disekitar bibir pantai dengan tinggi ombak yang sedang.
15.	Kelemahan / Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada batasan kawasan aktivitas pengunjung untuk berenang atau bermain air dengan kegiatan nelayan, hal ini untuk mengurangi bau yang tidak sedap dan faktor keamanan. - Fasilitas toilet / MCK yang kondisinya kurang

		<p>memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan lingkungan kurang terjaga dengan banyaknya sampah yang tersebar di lokasi (belum ada TPS terpadu) - Belum adanya petugas pantai (<i>baywatch</i>) yang mengawasi aktivitas pengunjung.
--	--	---

Sumber : Laporan akhir pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek

b. Pantai Karanggongso

Pantai Karanggongso terletak 3 Km ke arah timur dari Pantai Prigi. Pantai yang terkenal dengan pasirnya yang putih, sehingga dapat dibillang dengan pantai Pasir Putih ini mempunyai panjang sekitar 1,5 km berair jernih dan tenang, dapat juga sebagai sarana mandi dan berjemur bagi para pengunjung. Di sekitar pantai tersedia hotel yang dikelola oleh swasta, rumah makan, dan persewaan kapal wisata.

Di pantai Karanggongso atau Pasir Putih ini yang berada di obyek wisata ini adalah masyarakat pesisir yang aslinya di daerah sekitar pantai. Sehingga pemberdayaan masyarakat pesisir juga terlihat hasilnya di Pantai Pasir Putih. Dari masyarakat pesisir disini mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan lingkungannya, sehingga mereka membuat suatu kelompok yang fungsinya untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih dengan sebutan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) diketuai oleh Bapak Suani. Jadi merekalah yang secara mandiri mengawasi dan menjaga daerah perlindungan laut sekaligus daerah wisata Pantai Pasir Putih yang berada dalam program *fish sanctuary* untuk daerah perlindungan laut yang diketuai oleh Bapak Kamari.

Di Desa Tasikmadu terdapat kawasan perlindungan laut (*fish sanctuary*) seluas 81 Ha, pada Pantai Pasir Putih dengan basis perlindungan sumberdaya terumbu karang dan rehabilitasi hutan bakau. Pada kedua kawasan tersebut terdapat kelembagaan yang dibuat dengan prinsip *co-management* untuk

melakukan pengelolaan secara bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintah setempat.

Menurut Susilo, dkk (2007) dalam usaha pelestarian dan pengawasan pengelolaan *fish sanctuary* telah dibentuk gugus pengelola dengan perlindungan laut yang mempunyai tugas sebagai:

- a. Membuat perencanaan pengelolaan wilayah perlindungan yang disetujui masyarakat melalui keputusan bersama.
- b. Mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang dilindungi untuk kepentingan bersama.
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam keputusan.
- d. Melakukan penyitaan dan pemusnahan barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan dalam keputusan.

Kelembagaan yang melakukan pengelolaan *Fish Sanctuary* disebut Gugus Pengelola Daerah Perlindungan Laut Pasir Putih. Gugus ini mempunyai tugas adalah: a. mencatat dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pelanggaran dalam pengelolaan *fish sanctuary*; b. mencatat identitas atau nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan dari aturan FSPP; c. memberikan peringatan dan penjelasan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran untuk pertamakali; d. menerapkan sanksi denda material kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran setelah melalui peringatan; e. melaporkan kepada pihak berwajib jika pelanggar tidak mengindahkan aturan dan segala konsekuensi terhadap aturan FSPP; f. melaporkan segala hasil kegiatan monitoring dan pengawasan dalam pertemuan Gugus Pengelola.

Tugas dan tanggung jawab Gugus Pengelola *Fish Sanctuary* utamanya dilakukan secara sukarela atas kesadaran sendiri atau tugas instansi. Dana yang

dikumpulkan dari denda terhadap pelanggar aturan dikelola bersama oleh gugus pengelola melalui kordinator gugus. Penggunaan dana ditujukan untuk kegiatan operasional serta perbaikan lingkungan *fish sanctuary*.

Kawasan perairan *fish sanctuary* berair jernih dengan kecerahan tinggi, gelombang relatif besar serta terdapat arus pasang surut. Terumbu karang yang ada di dasar perairan *fish sanctuary* berupa terumbu karang alami dan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan berbentuk stupa, substrat yang berasal dari batu karang rusak ditanam atau ditenggelamkan didasar perairan *fish sanctuary*. Jenis karang yang tumbuh karang jahe dan karang opak-opak. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Macam-macam karang yang ada di daerah *Fish Sanctuary* Pantai Pasir Putih

Biota ikan karang banyak mendiami kawasan *fish sanctuary* seperti kerapu, jagu, jendoli, bago, kupon, teripang. Ikan bendera dan kupon merupakan jenis ikan yang dominan.

Kelompok masyarakat Gugus Pengelola *Fish Sanctuary* mengoperasikan perahu wisata, tak kurang dari empat perahu wisata dan jetty (jembatan) yang berada dikawasn pantai yang diberikan pemerintah, dioperasikan oleh masyarakat pesisir dengan menyewakan perahu-perahu tersebut kepada wisatawan yang ada di Pantai Pasir Putih. Sehingga dapat menyeimbangkan antara ekonomi masyarakat pesisir dengan perlindungan laut yang ada disekitar kawasan wisata. Dan hasil kegiatan ini digunakan untuk membiayai operasinal kelompok dalam mengawasi daerah perlindungan laut. Dibawah ini adalah gambar perahu yang sewekan dan Jetty (jembatan) yang digunakan dalam melakukan pengawasan:



Gambar 14. Jetty dan Perahu wisata yang ada di Pantai Pasir Putih yang digunakan untuk pengawan dan juga untuk wisata

Berdasarkan Buletin PNPM (2009), Masyarakat pesisir sekitar *fish sanctuary* mulai merasakan manfaat ekonomi secara tidak langsung dari keberadaan daerah perlindungan laut ini. Keasrian kawasan *fish sanctuary* menarik banyak wisatawan untuk menikmati keindahannya. Masyarakat pesisir

mulai mengusahakan jasa makanan, seperti kios seafood, kedai minuman dan jasa parkir. Kesadaran masyarakat akan kelangsungan *fish sactuary* sudah mulai tumbuh dengan berkembangnya kawasan ini menjadi obyek wisata bahari. Masyarakat dengan kesadaran sendiri menjaga kebersihan lingkungan fish sactuary, melakukan penanaman mangrove, menjaga kawasan dari tindak pengrusakan seperti; pencurian biota laut, karang, pasir maupun penebangan bakau.

Sebagai kawasan wisata bahari disamping nilai jual pemandangannya, atraksi wisata bahari juga sangat potensial dikembangkan. Atraksi wisata bahari yang dikembangkan adalah mengitari kawasan perairan dengan perahu wisata. Perahu ini selain untuk operasional patroli pengawasan juga dapat sebagai perahu wisata bagi para pengunjung yang ingin melaut.

Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada hubungan harmoni antara kelestarian lingkungan dan aspek ekonomi. Perlu disadari bahwa alam yang terjaga kelestariannya akan memberikan manfaat akan kesinambungan ekonomi dan kualitas hidup manusia.

Sumber daya alam di Pesisir Teluk Prigi Kecamatan Watulimo harus dipandang sebagai aset masa depan dan bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks demikian, daerah pesisir Teluk Prigi memiliki nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, pengelolaan yang tepat atas sumber daya alam akan menjadi basis integrasi sosial dan kerukunan hidup bersama. Dalam konteks budaya, merupakan media manifestasi aktivitas ritual, seperti upacara labuh laut sembonyo maupun wisata bahari (pemancingan dan penyelaman). Secara ekonomi memberikan ruang bagi masyarakat setempat mengembangkan diversifikasi usaha, ragam mata pencaharian, dan meningkatkan pendapatan. Dalam konteks lingkungan, Teluk Prigi merupakan medan untuk mewujudkan komitmen konservasi lingkungan,

sehingga sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Sehingga untuk masyarakat yang melanggar atau kedapatan membawa atau merusak daerah *fish sanctuary* akan dikenai denda, menjala ikan atau mengambil pasir atau bebatuan karang misalnya. Seperti dalam Buletin PNPM (2009) dikatakan bahwa, Lurah mereka pernah kena denda masyarakat karena hewan ternaknya memakan tumbuhan bakau di areal *fish sanctuary*. Bahkan Bupati Trenggalek periode 2000-2005, sewaktu masih menjabat pernah kena denda masyarakat karena kedapatan membawa batu karang. Di bawah ini dapat dilihat karakteristik dari Pantai Karanggongso atau Pantai Pasir Putih:

Tabel 9. Karakteristik dan Potensi Obyek Wisata

Pantai Karanggongso atau Pasir Putih		
1.	Lingkup Administratif	Desa Tasikmadu – Kecamatan watulimo
2.	Luas Pantai	± 4 Ha
3.	Panjang Pantai	± 1 Km
4.	Orientasi Lokasi	± 52 Km arah selatan kota Trenggalek, lokasi pantai berdampingan dengan Pantai Prigi (3 Km dari pantai Prigi)
5.	Pencapaian atau Akses	Jalan yang dilalui sebagian besar sudah beraspal hotmix dengan kondisi baik dan sebagian sedang. Pencapaian dari arah kota Trenggalek dan Tulungagung melalui IKK Bandung (Kab. Tulungagung). Selanjutnya dari IKK Bandung menempuh jarak ± 18 Km menuju Kec. Watulimo. Dari simpang tiga pantai Prigi lurus sejauh 3 Km dengan kondisi relatif baik.
6.	Moda Transportasi Umum	Semua jenis kendaraan (sepeda motor, mobil, dan bis) dapat mencapai ke lokasi. MPU jenis colt / bison tersedia mulai dari simpang tiga Durenan (jalan propinsi). Dari terminal kota Trenggalek menggunakan mini bus kode X (jurusan Trenggalek-Durenan-Bandung-Watulimo), dapat dilanjutkan dengan moda kendaraan umum lokal (colt dan ojek).
7.	Pengelola	Pemkab Trenggalek dibawah DISPORAPRIBUD

8.	Harga KTM	Rp. 3000,-
9.	Penggunaan Lahan	<p>Kawasan Terbangun:</p> <p>Berpola linier sepanjang pantai mengikuti garis pantai dan jalan. Kawasan terbangun terdiri dari badan jalan, sarana fasilitas pendukung, lahan parkir di hotel dan utilitas.</p> <p>Kawasan tidak terbangun:</p> <p>Berupa hutan campuran yang menyebar disekitar lokasi.</p>
10.	Kegiatan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Berenang atau bermain air - Berjemur - Interaksi dengan nelayan
11.	Wisata Pendukung	Hiburan Hotel
12.	Fasilitas dan Utilitas	<p>Fasilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel dan penginapan: Hotel Logano dan Pondok Prigi Cotage - Lahan Parkir - Rumah makan, warung dan kios <p>Utilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MCK / toilet umum - Listrik - Air bersih - Areal jaringan Wireless phone (HP)
13.	Kegiatan Khusus	<p>Upacara tradisional Larung Sembonyo (Pantai Prigi)</p> <p>Kegiatan di pantai prigi itu juga berdampak pada angka kunjungan di Pantai Karanggongso atau Pasir Putih (lokasi berdekatan).</p>
14.	Potensi Atau Daya Tarik Wisata	<p>Pasir Putih adalah pantai dengan pantai berpasir putih, ombak yang tenang dan landai sangat ideal untuk aktivitas berenang atau berjemur. Adanya fasilitas persewaan perahu memudahkan wisatawan untuk berwisata menelusuri keindahan teluk prigi dengan panorama pantai, laut dan kepulauan.</p> <p>Tersedianya fasilitas restoran, warung makan yang telah dibangun disertai areal parkir yang luas menjadikan obyek wisata pantai pasir putih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.</p>
15.	Kelemahan / Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Atraksi wisata yang ada masih monoton (berenang, pesiar perahu dan menikmati panorama) - Kebersihan lingkungan belum terjaga (tempat sampah umum sangat minim) - Belum adanya pengawas pantai (<i>baywatch</i>) yang mengawasi aktivitas pengunjung yang berenang.

Sumber : Laporan akhir pengembangan pariwisata Kabupaten Trenggalek

Terlihat rombongan wisatawan dari berbagai daerah, dari plat nomor mobil dan bus yang diparkir diketahui asalnya, ada dari Kediri, Malang serta Jawa Tengah. Pantai ini juga lumayan bersih dan tertata keasriannya, sarana penunjang wisata lengkap, air bersih untuk mandi atau membilas badan beserta kamar mandi berjumlah puluhan, cukup layak menjadi andalan obyek wisata. Dibawah ini salah satu pengunjung yang menikmati tempat obyek wisata.



(a)



(b)

Gambar 15. Pengunjung a) Wisatawan yang asik Bermain pada Pantai Pasir Putih, b) Wisatawan yang asik berbelanja ikan asap Pada pantai Prigi

Dapat dilihat dari berapa banyak pengunjung dua tahun terakhir, pada tahun 2008 total selama setahun wisatawan yang datang ke pantai prigi sebanyak 108.618 pengunjung, sedangkan Pantai Karangongso atau Pantai Pasir Putih sebanyak 136.535 pengunjung. Pada tahun 2009 pantai Prigi 131.039 pengunjung dan Pantai Pasir Putih 195.241 pengunjung. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah jumlah pengunjung yang berkunjung ke Pantai Prigi dan Pantai Karangongso:

**Tabel 10. Daftar Pengunjung Obyek Wisata
TAHUN 2008**

NO	NAMA OBYEK WISATA	Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKTB	NOP	DES	JUML
1	P. Pelang	10468	8999	5526	999	1227	1477	2034	1322	1196	9107	1274	2484	46113
	Wisnu													
	Wisman													
2	P. Damas	34	23	21	-	530	292	179	42		123	99	1050	2393
	Wisnu													
	Wisman													
3	P.Prigi	14930	3579	4947	4002	7472	8940	5781	1255	23987	23987	5228	4510	108618
	Wisnu													
	Wisman													
4	P.Kr.Gongso	7603	5487	8546	6684	11772	12801	16870	9357	1652	39987	7599	8177	136535
	Wisnu													
	Wisman													
5	Guo Lowo	3523	1597	1587	1796	2927	4806	3784	2404	666	5233	2115	3220	33658
	Wisnu													
	Wisman													
6	Kolam r. JW													
	Dewasa	2304	1446	1900	1522	1749	1655	1918	1220	46	2811	2157	1805	20533
	Anak	2060	1096	1439	1195	1465	1228	1689	836	50	2644	1903	1784	17389
JUMLAH		40922	22227	23966	16198	27142	31199	32255	16436	27597	83892	20375	23030	365239

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya

**Tabel 11. Daftar Pengunjung Obyek Wisata
TAHUN 2009**

NO	NAMA OBYEK WISATA	Jan	Feb	Mar	Aprl	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKTB	NOP	DES	JUML
1	P. Pelang	9531	1152	1554	1591	1633	1509	1609	882	5596	771	1169	1559	28556
	Wisnu													
	Wisman													
2	P. Damas	184	37	191	92	33	60	70	54	256	101	186	55	1319
	Wisnu													
	Wisman													
3	P.Prigi	33850	4123	5899	6045	10211	9821	13941	4141	21679	6255	7185	7889	131039
	Wisnu													
	Wisman													
4	P.Kr.Gongso	40017	6391	1247	10963	16260	1637	22723	26241	38123	11583	11160	8896	195241
	Wisnu													
	Wisman													
5	Guo Lowo	5590	2016	2573	2375	4033	6436	4563	1741	5409	2815	3197	2997	43745
	Wisnu													
	Wisman													
6	Kolam r. JW													
	Dewasa	2680	1881	2425	1683	2131	1743	2442	416	DIRENOVASI		759	2286	18446
	Anak	4948	1768	1982	1647	2282	1812	2234	308			985	2047	20013
JUMLAH		96800	17368	15871	24396	36583	23018	47582	33783	71063	21525	24641	25729	438359

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Budaya

4.3 Dukungan Kebijakan Atau Peran Serta Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) Dalam Menangani Obyek Wisata Pantai Prigi Dan Juga Pantai Pasir Putih

Menurut laporan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Trenggalek (2007), Secara umum potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah yang cukup banyak, dan setiap obyek memiliki kelebihan tersendiri, terutama pada obyek wisata Pantai Selatan. Namun demikian ternyata selain potensi yang dimiliki, obyek-obyek wisata tersebut memiliki banyak kekurangan, yaitu

1. Variasi obyek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek kurang beragam. Meskipun memiliki jumlah banyak, tetapi yang memiliki kekhasan tersendiri hanya beberapa, yaitu Pantai Prigi, Pantai Blado, Pantai Ngulung, Pantai Ngampiran, Pantai Damas dan Dilem Wilis
2. Jarak obyek wisata terutama wisata pantai jauh dari pintu gerbang wisata untuk Kabupaten Trenggalek, yaitu Kota Trenggalek.
3. Aksesibilitas untuk kawasan wisata di Trenggalek bagian Selatan relatif rendah, karena kurang ditunjang oleh prasarana jalan dan sistem perangkutan yang kurang baik.
4. Lokasi masing-masing obyek yang tersebar dan memiliki jarak yang jauh menyebabkan sulitnya pengembangan suatu zona wisata yang terpadu.
5. Banyaknya lokasi obyek wisata yang merupakan bagian dari tanah milik Perum Perhutani, sehingga pihak swasta sulit dilibatkan dalam pengembangan obyek-obyek wisata.

6. Pada obyek-obyek yang sudah dikembangkan, pengaturan ruangnya masih kurang teratur, sehingga mengurangi daya tarik obyek.
7. Pada obyek-obyek yang sudah dikembangkan, kurang dikelola dengan baik (karena keterbatasan dana), sehingga mengurangi pelayanan pada para wisatawan, yang mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata tersebut.
8. Pengaturan disekitar beberapa lokasi obyek wisata yang kurang baik mengurangi daya tarik obyek wisata tersebut.

Pada beberapa obyek yang telah dikembangkan ternyata tidak ditunjang dengan sistem utilitas yang baik, sehingga mengganggu atau mengurangi kenyamanan wisatawan dalam berwisata.

Tabel 12. Potensi dan Masalah pada Obyek Wisata Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih

No	Obyek Wisata	Masalah	Potensi
1	Pantai Karanggonso / Pasir Putih	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Umum belum mencapai lokasi. • Kurangnya pemeliharaan fasilitas yang ada. • Kebersihan kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemandangan pantai yang indah. • Ombak laut tenang berenang dan berlayar. • Atraksi wisata berupa upacara ritual.
2	Pantai Prigi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemeliharaan fasilitas yang ada. • Kurangnya utilitas air bersih. • Kebersihan tidak terjaga. • Aroma pantai kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas lengkap • Dekat Dermaga Nusantara • Dekat dengan TPI • Aksesibilitas yang cukup mudah

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Trenggalek 2007

Selain itu menurut Pak Sunaryo selaku Kepala UPT. Kawasan Pasir Putih:

“Dari Dinas sudah memberikan kebijakan terhadap pedagang tersebut, dan mereka sudah disediakan ruko-ruko yang berada di areal parkir. Dan disini juga ada yang pro dan kontra, tapi juga apa daya, sudah ada kiosnya tapi tidak ditempati. Roda empat juga tidak boleh masuk pada saat hari-hari libur. Parkirnya juga sudah disediakan.”

“ya karena sudah disediakan tempat parkir, untuk tempat wisatanya itu sendiri bukan untuk tempat parkir, tapi untuk berwisata. Sebenarnya sepeda motor atau roda dua itu juga tidak boleh masuk kedalam wisata, tetapi dari dinas juga masih membebaskan untuk sepeda bisa masuk dan kita juga tidak punya kebijakan. Batasannya cuman roda dua, tetapi masuknya tidak boleh lewat dari arah pelabuhan tetapi dari barat arah pengeringan ikan.”

Masalah lain yang dihadapi dengan Dinas adalah masyarakat setempat, Pak Sunaryo menyatakan bahwa:

“Di awal tahun kita Pariwisata yang ramai Prigi, ditahun 1999 ini sudah dominan ke Pantai Pasir Putih. Karena apa, ditahun itu kealamiah Prigi sudah mulai hancur atau menghilang, yang pertama karena pantai Prigi bergabung dengan pantai nelayan, karena pohon-pohon yang rindang ini, Pohon kelapa ini juga terserang hama, dalam bahasa Jawa terkena Hama wambung dari Dinas Perkebunan dan Pertanian juga menyebutnya wambung, jadi semuanya habis. Jadi dari kami petugas Dinas pariwisata melakukan penghijauan kembali dan juga mempelajari tanaman yang cocok untuk daerah pantai dan berpasir itu apa, dan ternyata pohon ketapang ini yang paling cocok. Cuman masyarakat sekitar sini kurang setuju dengan adanya pariwisata ini, saya juga menyadari dari anak-anak muda yang moralnya bejat suka merusak tanaman ketapang ini, apalagi kalau malam hari dan sudah terkena alkohol, gazebo yang ada di pantai Prigi dirubuhkan atau di rusak dan fasilitas yang lain.”

Selain melakukan pengembangan terhadap obyek wisata diperlukan juga adanya pengembangan pusat sarana dan jasa wisata, seperti; informasi wisata, akomodasi wisata, hotel, biro perjalanan, bank atau ATM, *money changer*, kesehatan, dan sebagainya. Pengembangan sarana dan jasa wisata tersebut dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Lokasi Kabupaten Trenggalek dapat menunjang perkembangan sektor pariwisatanya, dimana dapat diakses dari Kota Surabaya, Kediri (sebelah utara), Kabupaten Blitar dan Tulungagung (sebelah timur), Kabupaten Ponorogo dan

Pacitan (sebelah barat). Kabupaten-kabupaten di sekitar Kabupaten Trenggalek tersebut merupakan pendukung pengembangan sektor pariwisata yang terdapat di Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa pintu masuk yang dilengkapi dengan prasarana jalan dan dapat dilalui untuk menuju obyek wisata yang ada. Tetapi tidak semua obyek wisata di Kabupaten Trenggalek dapat terjangkau oleh angkutan umum, karena ada beberapa obyek wisata yang tidak dilalui oleh jalur angkutan umum. Namun, obyek wisata tersebut dapat dijangkau melalui kendaraan pribadi, seperti; sepeda motor maupun mobil. Keterbatasan sarana angkutan umum menyebabkan kunjungan wisata di Kabupaten Trenggalek terbatas, karena tidak semua pengunjung datang menggunakan kendaraan pribadi.

Permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek saat ini adalah tingkat aksesibilitas yang rendah, sehingga menghambat perkembangan pariwisata. Rendahnya tingkat aksesibilitas tersebut disebabkan belum tersedianya jalur atau akses yang menghubungkan antara jalur wisata nasional dengan kabupaten. Pada perkembangannya kawasan selatan Kabupaten Trenggalek akan dilalui oleh jalur lintas selatan (JLS). Dengan adanya pengembangan JLS tersebut, Kabupaten Trenggalek dapat direkomendasikan menjadi salah satu Jalur Wisata Nasional yang melewati Jawa Timur, sehingga dapat mendukung perkembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Untuk pengembangan kawasan wisata lebih lanjut di Kabupaten Trenggalek, perlu disusun suatu ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh obyek wisata di Kabupaten Trenggalek. Ketentuan umum disusun untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aspek yang dipertimbangkan dalam ketentuan umum Rencana Induk Pengembangan Pariwisata ini adalah aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.

Berdasarkan karakter obyek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek, untuk ketentuan umum pengembangan wisata, tampaknya obyek-obyek wisata tersebut dapat dikelompokkan dalam dua karakter utama, yaitu :

- Kawasan yang berada dilokasi dengan kondisi lahan layak dikembangkan, yaitu kawasan wisata yang tidak bermasalah bila dilihat dari kekuatan lahannya;
- Kawasan yang termasuk dalam kawasan lindung yaitu bermasalah bila pengembangannya tidak terkontrol, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan khusus dalam pengembangan dari pengoperasian obyek-obyek wisata tersebut.

Berdasarkan pengelompokan tersebut maka ketentuan umum yang diberlakukan untuk pengembangan obyek wisata yang ada dikelompok lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Obyek wisata yang berada di kawasan layak dikembangkan, pengaturannya disesuaikan dengan rencana pengembangan yang sudah ada, baik itu rencana kota, maupun rencana pengembangan kawasan.
2. Obyek wisata yang termasuk dalam kawasan lindung, ketentuan umum pengaturannya disesuaikan dengan pengaturan yang telah ditetapkan di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, yaitu:
 - a. Kawasan suaka alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat, maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

b. Kawasan Perlindungan Bawahannya, Kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan perlindungan terhadap ekosistem dan perlindungan alam, terutama perlindungan terhadap tanah dan air. Kawasan ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: Kawasan Hutan Lindung, terbagi menjadi dua, yaitu

1. Kawasan Hutan Lindung Mutlak
2. Kawasan Hutan Lindung Terbatas

Kawasan yang memiliki ketinggian 1000 - 2000 meter dari permukaan laut, kelerengan 40 % atau lebih, atau hutan yang memiliki faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor 175. Pengaturan untuk kawasan ini adalah untuk kawasan yang sudah terbangun disarankan untuk tidak dikembangkan lebih lanjut dan dibagian yang memiliki lahan yang mungkin dikembangkan (kawasan yang datar) boleh dikembangkan dengan bangunan satu sampai dua bangunan perhektar.

c. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan yang berada di atas 1000 meter dari permukaan laut, atau memiliki kelerengan lebih dari 40 % atau wilayah kepulauan yang memiliki ketinggian di atas 2/3 titik tertinggi pulau itu. Penanganan untuk kawasan ini sama dengan kawasan hutan lindung terbatas.

4.3.1 Rencana Pengembangan Sosial Budaya

Pengembangan aspek sosial budaya merupakan aspek yang penting untuk dikembangkan. Dengan dikembangkannya aspek ini diharapkan akan menjadikan obyek wisata di Kabupaten Trenggalek memiliki nilai tambah dan dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan. Untuk itu diperlukan pelestarian dan

pembinaan dalam hal budaya ini. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengorganisasian pelestarian seni dan budaya tersebut, antara lain adalah :

- Memberikan keahlian dalam membuat cinderamata pada penduduk setempat, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa di sekitar lokasi wisata.
- Pada desa-desa yang memiliki potensi, hendaknya didirikan suatu *art shop*, sehingga dapat menunjang kegiatan wisata pada obyek wisata terdekat.
- Mengadakan penyuluhan sadar wisata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari penduduk dikawasan pedesaan sampai dengan dikawasan perkotaan. Hal ini diharapkan dapat menjadikan suatu bentuk pelayanan tersendiri bagi para wisatawan.

4.3.2 Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan kawasan wisata harus ditunjang pula dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata. Untuk itu langkah-langkah yang harus diambil adalah:

1. Melengkapi obyek-obyek wisata, terutama obyek wisata prioritas dengan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan karakter dari setiap obyek wisata tersebut, dan karakter serta keinginan pengunjung ketika mendatangi lokasi.
2. Meningkatkan fungsi dan sistem transportasi yang menghubungkan pintu gerbang wisata Kabupaten Trenggalek dengan setiap obyek wisata, yaitu berupa peningkatan jaringan jalan dan pengadaan angkutan umum menuju obyek wisata, minimal pada waktu-waktu tertentu, dimana frekuensi pengunjung sedang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan pengusaha jasa angkutan umum, supaya dapat menyediakan angkutan

umumnya pada waktu-waktu tertentu untuk melayani penumpang atau wisatawan ke obyek wisata.

3. Pengembangan sistem jaringan air bersih dan penerangan (listrik) ke obyek-obyek wisata sangat diperlukan, terutama pada obyek-obyek wisata prioritas.

Dalam pengembangan pariwisata, ada dua jenis pengembangan yang ada hubungannya dengan sumber daya manusia serta kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh didalam masyarakat. Kedua jenis pengembangan tersebut tentunya berhubungan dengan aspek sosiologi, yaitu:

- a. Pariwisata yang tumbuh secara alami, yaitu pariwisata yang dikembangkan oleh masyarakat secara spontanitas dan alamiah tanpa dorongan ataupun bimbingan dari pemerintah maupun dari badan pariwisata lainnya. Dengan *instin* mereka mengembangkan dirinya untuk berkecimpung dibidang kepariwisataan dengan bermodalkan pengetahuan tentang pariwisata yang minim. Mereka hanya dapat melihat, mendengar dan meniru dari apa yang ada disekelilingnya, bahkan cenderung sekedar untuk ikut-ikutan, tetapi mereka sadar akan kekayaan alam dan budaya di wilayahnya. Kondisi seperti inilah yang memacu semakin cepatnya pertumbuhan pariwisata di daerah-daerah. Memang pada akhirnya cenderung tidak akan sejalan dengan perencanaan yang akan disusun oleh pemerintah secara konsepsional.
- b. Pertumbuhan pariwisata secara konsepsional, biasanya dilakukan secara terencana oleh pemerintah atau oleh pihak swasta yang memiliki modal kuat, melalui suatu studi dan perencanaan yang matang. Tenaga yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata jenis ini ialah tenaga-tenaga ahli yang profesional. Karena perencanaan ini membutuhkan biaya yang besar maka

pasar wisatawan yang diutamakan untuk obyek ini ialah wisatawan golongan menengah ke atas, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk wisatawan golongan rendah. Keuntungan dari pengembangan obyek wisata jenis ini ialah pelayanan kepada wisatawan akan dapat terpadu, tidak akan terjadi kompetisi yang tidak sehat antar para pengusaha, karena mereka sadar akan klasifikasi usahanya.

Berdasarkan kondisi yang ada dan analisis yang telah dilakukan, maka untuk obyek-obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Trenggalek dapat dikembangkan dengan menggunakan perpaduan dari kedua jenis pengembangan pariwisata tersebut. Hal ini dilakukan, karena perkembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek umumnya tumbuh secara alamiah. Namun demikian, untuk pengembangan lebih lanjut dibutuhkan profesionalisme yang tinggi, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Dalam hal penyerapan dan pemanfaatan sumber daya manusia disekitar lokasi wisata, pasti akan terjadi, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pada setiap obyek wisata. Secara teoritis, pengelompokan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. *Pre Operational In Direct Line Employee*

Yaitu pekerja yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan kawasan wisata sebelum masa operasinya, antara lain: produsen barang-barang kerajinan atau *souvenir*, buruh angkut barang, para *supplier* barang-barang untuk pembangunan dan pengembangan obyek, dan lain-lain. Para pekerja ini tidak digaji secara langsung oleh pengelola obyek.

b. Pre Operational Direct line Employee

Pekerja golongan ini langsung dipekerjakan oleh perusahaan yang menangani pembangunan dan pengembangan obyek wisata, misalnya pekerja bangunan dan tenaga ahli yang diperlukan, petugas kebersihan, buruh bangunan dan sebagainya yang mutlak diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan obyek. Jenis tenaga kerja ini dapat berupa pekerja kontrakan ataupun karyawan. Untuk jangka waktu panjang, mungkin pihak perusahaan akan mengangkatnya menjadi karyawan tetap.

c. Operational Direct Line Employee

Yaitu pekerja yang dipekerjakan langsung pada masa operasional, baik didalam lokasi obyek maupun di luar obyek dan secara *part timer* (paruh waktu) ataupun secara *full timer*. Misalnya tenaga pemasaran, *advertising*, dan lain-lain.

d. Operational In Direct Line Employee

Yaitu pekerja yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan industri wisata, seperti; pekerja dari *supplier*, pekerja dari bidang hukum atau akuntansi, dan sebagainya.

4.3.3 Peningkatan Peran Pelaku Wisata (Stake Holders)

Pelaku wisata dalam hal ini adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan didalam kepariwisataan, baik pihak pemerintah, swasta dan pihak masyarakat sekitar kawasan wisata. Yang dimaksud dengan peningkatan peran pelaku wisata (*stake holders*) adalah lebih mengarah pada sistem pelaksanaan secara administratif berdasarkan pada fungsi masing-masing pihak. Dengan demikian maka akan terbentuk suatu kerjasama yang lebih terarah didalam

pengembangan, perencanaan maupun didalam pengelolaan pariwisata yang lebih profesional.

Fungsi masing-masing pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai pelaku wisata) adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai koordinator didalam kepariwisataan yang bekerja sama dengan pihak swasta sebagai investor dan pihak masyarakat sebagai partisipasi dalam pengembangan obyek wisata. Sehingga disini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dengan program-program dan kebijaksanaan-kebijaksanaanya. Untuk lebih jelasnya fungsi pemerintah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Sebagai pemberi ijin terutama dalam kaitannya dengan kepariwisataan seperti pemberian ijin didalam pengembangan akomodasi wisata, jasa wisata dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
- Menentukan batasan-batasan bangunan fisik, terutama menentukan lahan yang difungsikan untuk pengembangan bangunan fisik, lahan sebagai konservasi, dan fungsi-fungsi lainnya berdasarkan dari hasil perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan. Dengan demikian diharapkan produk yang hasil baik dalam jangka pendek atau jangka panjang menjadi lebih terarah dan terpadu.
- Sebagai pelopor dan pelaksana program didalam pengembangan kawasan wisata.
- Sebagai pengkoordinasi pelaku-pelaku wisata lainnya yang tujuannya adalah untuk pengembangan obyek wisata secara bersama-sama.

b. Swasta

Swasta merupakan sebagai investor. Jadi fungsi swasta disini juga mempunyai peranan yang sangat penting didalam pengembangan obyek wisata terutama dalam kaitannya dengan pengembangan fasilitas penunjang wisata seperti; hotel, pondok wisata, restouran, biro perjalanan, dan fasilitas-fasilitas penunjang wisata lainnya.

Mengangkat sumberdaya manusia guna meningkatkan pelayanan, manajemen pengelolaan yang lebih profesional. Dengan demikian selain menguntungkan pihak swasta (dengan sumber daya manusia yang baik dan bermutu diharapkan akan mampu meningkatkan usaha bisnisnya dalam kepariwisataan), juga akan berpengaruh banyak pada pihak-pihak lain seperti, dari segi pajak akan menguntungkan pemerintah, dari segi tenaga kerja akan menguntungkan masyarakat sekitar, hal ini karena semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di bidang kepariwisataan, maka secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja masyarakat sekitar.

Swasta selain sebagai investor juga berperan sebagai promosi wisata, hal ini karena guna meningkatkan usaha bisnisnya disektor kepariwisataan, maka usaha yang dilakukan adalah dengan mempromosikan usahanya, dengan demikian secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap perkembangan obyek wisata (dalam kaitannya dengan jumlah kunjungan wisatawan). Berdasarkan kondisi diatas maka didalam promosi lebih ditekankan secara bersama-sama (yaitu semua pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya) sehingga lebih terarah dan terpadu.

c. Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata

Peran masyarakat disini erat kaitanya dengan partisipasi didalam pengembangan obyek wisata seperti:

- Turut serta menjaga keamanan agar wisatawan menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu.
- Turut menjaga kebersihan dan turut serta menjaga lingkungan sekitar kawasan.
- Turut serta berperan aktif didalam mengangkat sektor kepariwisataan yaitu dengan cara ikut mempromosikan.

Dengan demikian maka masyarakat sekitar dituntut untuk ikut berperan aktif didalam segala bidang dalam kaitannya dengan kepariwisataan, karena secara tidak langsung, jika obyek wisata tersebut berkembang dan jumlah wisatawan terus meningkat akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

4.3.4 Sosialisasi Dan Kerjasama Dalam Pengembangan Pariwisata

Sosialisasi dan kerjasama dalam pengembangan pariwisata merupakan program lanjutan dari bentuk-bentuk perencanaan yang telah dihasilkan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mampu menjawab keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan (seperti pelaku wisata, maupun pada masyarakat sekitar) yang kemudian dipadukan dengan hasil produk-produk rencana. Bentuk-bentuk sosialisasi tersebut adalah:

- a. Mensosialisasikan hasil perencanaan pariwisata seperti
 - Sosialisasi terhadap warga masyarakat yang menempati areal permukiman disekitar kawasan wisata.
 - Sosialisasi terhadap pedagang kaki lima berdasarkan dari hasil rencana penataan PKL yaitu melalui pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan.

- Sosialisasi terhadap sistem penataan sirkulasi kendaraan baik terdapat pelaku wisata sendiri terutama terhadap pengelola, wisatawan, masyarakat sekitar, juga dengan menggunakan sistem kekeluargaan.
- Dan bentuk-bentuk sosialisasi lainnya yang berkaitan erat dengan masalah perencanaan yang berdasarkan dari hasil perencanaan yang telah dicapai.

b. Pelaksanaan program hasil dari sosialisasi dalam bentuk kerjasama dalam pengembangan, yaitu merupakan proses kelanjutan dari sosialisasi yang telah dilakukan dalam bentuk penerapan-penerapan rencana yang telah disepakati bersama baik oleh pelaku wisata, masyarakat sekitar dari lain-lain. Sistem sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Harus benar-benar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat.
- Dengan cara melalui pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- Dengan cara melalui orang ketiga yang mengerti banyak tentang kondisi sosial budaya masyarakat, cara berfikir masyarakat maupun dengan cara memberi contoh langsung dilapangan. Dengan demikian diharapkan akan mampu memberi kesadaran, yang pada akhirnya akan diikuti oleh yang lainnya.
- Dengan cara melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam misi untuk kepentingan bersama.

Dengan cara pendekatan-pendekatan dalam melaksanakan sosialisasi dan kerja sama, maka diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan akan terwujud suatu produk perencanaan kepariwisataan yang terpadu dan mampu meningkatkan jumlah wisatawan.

4.4 Dampak Pariwisata Pantai Terhadap Masyarakat Pesisir

Pembahasan mengenai dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang meliputi ide, gagasan, nilai, norma, dan aktifitas berpola, kesemuanya itu diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, interaksi sosial, tradisi dan pelapisan sosial. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan akan terjadi dalam sebuah pembangunan ekonomi (pasar) yang dicerminkan oleh adanya kegiatan pariwisata baik itu berupa aktifitas wisata, perdagangan, pengolahan, penarikan jaring, pengasapan ikan yang ada disekitar wilayah obyek pariwisata, perubahan tersebut bisa menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat pesisir yang beraktifitas di daerah pariwisata.

4.4.1 Dampak Pariwisata Terhadap Sosial

Adanya pariwisata yang dilakukan dalam pembangunan nasional telah menjadi faktor baru yang membawa dan juga dapat memberikan dampak atau nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap sosial-ekonomi.

Menurut Sujana (1995), dalam makalahnya disebutkan perubahan dampak ini yang diberikan secara langsung atau tidak langsung dalam pembangunan nasional dan perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat, adapun proses-proses yang mempengaruhinya:

- a. Proses perkembangan dan pembangunan
- b. Proses modernisasi
- c. Proses industrialisasi
- d. Proses globalisasi
- e. Proses westernisasi

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari proses-proses tersebut bagi masyarakat dan sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Telah menimbulkan pergeseran dan perubahan masyarakat (transformasi) dari masyarakat agraris menuju masyarakat yang industrial, sehingga kondisi ini telah menimbulkan keadaan yang labil dalam masyarakat.
2. Telah menimbulkan kondisi yang semakin terbuka, sehingga nilai-nilai dari masyarakat luar yang masuk dalam wilayah pariwisata membuat masyarakat setempat bisa bersosialisasi.
3. Telah menimbulkan gerak sosial yang divergen dalam masyarakat, sehingga masyarakat berkembang ke segala arah dan semakin majemuk. Dalam masyarakat telah terjadi pluralisasi secara berlanjut atau *continue* kesegala arah.
4. Telah terjadi mobilitas penduduk yang semakin terbuka dan tinggi, sehingga masyarakat semakin majemuk dalam ras dan juga etnik. Telah menimbulkan urbanisasi yang berkempanjangan antar daerah sehingga membuat pola-pola kehidupan atau sosialisasi semakin heterogen.
5. Telah terjadi susunan ruang lingkup fisik dan budaya yang semakin padat, sehingga muncul ancaman bagi ketertiban dan kehidupan dalam tata ruang.

Dari dampak yang ditimbulkan oleh proses-proses di atas, memberikan dampak yang bersifat netral dalam industri kepariwisataan pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dengan kata lain tidak memberikan dampak yang negatif atau positif saja. Dampak yang didapat dalam keadaan lapang antara lain: a). perubahan dalam cara berfikir dan mengetahui. b). perubahan dalam menggunakan iptek dan peralatan. c). perubahan dalam memilih lapangan kerja. d). perubahan dalam bentuk pemukiman dan perubahan. e). perubahan pola-pola interaksi dan komunikasi. f).

perubahan dan perluasan lapangan kerja. g). perubahan dalam pendapatan. h). perubahan dalam kepuasan kerja. i). perubahan dalam interaksi atau hubungan kerja. j). perubahan dalam penggunaan penghasilan. k). perubahan dalam nilai makna-makna ekonomis.

Industri pariwisata juga dapat dikatakan memberikan dampak perubahan dalam lapangan kerja yang tidak terbatas (atau hampir tidak mengenal batasan-batasan), karena industri pariwisata memiliki kaitan yang sangat luas dengan sistem-sistem kehidupan ekonomi, seperti pekerjaan dalam sistem:

1. Sektor perhotelan
2. Sektor transportasi
3. Sektor rumah makan atau restoran
4. Sektor pramugari atau guide
5. Sektor hiburan atau rekreasi
6. Sektor industri cinderamata
7. Sektor keamanan di wilayah wisata
8. Sektor bisnis atau pertokoan
9. Sektor parkir di wilayah wisata

a. Dampak positif sosial

- Perlindungan Terhadap Kebudayaan : adanya perlindungan untuk benda-benda kuno, bangunan sejarah, seni tradisional seperti musik, drama, tarian, pakaian, upacara adat. Adanya bantuan untuk perawatan museum, gedung theater, dan untuk dukungan acara-acara festival budaya
- Pembaharuan Massa Kebudayaan: dengan adanya pembaharuan kebanggaan budaya maka masyarakat dapat memperbaharui kembali rasa bangga mereka terhadap peninggalan-peninggalan bersejarah ataupun budaya.

- Pertukaran Kebudayaan : pariwisata dapat menciptakan pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat setempat, sehingga membuat para wisatawan mengerti tentang budaya setempat dan mengerti akan nilai-nilai dari tradisi masyarakat setempat begitu pula sebaliknya masyarakat lokal pun bisa tahu tentang budaya dari para wisatawan tersebut baik yang domestik maupun internasional.

b. Dampak negatif sosial :

- Hilangnya fasilitas untuk penduduk : setiap pengelola obyek wisata selalu menginginkan tempat wisata untuk menyedot wisatawan baik domestik maupun internasional, tetapi ada hal-hal yang harus diperhitungkan karena apabila suatu obyek wisata terlalu padat, maka bisa menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk setempat dan membuat masyarakat setempat menjadi tidak nyaman dan pada akhirnya akan terbentuk garis batas antara penduduk lokal setempat dengan wisatawan yang terlalu banyak.
- Dampak budaya : karena ingin menyuguhkan sesuatu yang di inginkan wisatawan, tanpa di sadari mereka sudah terlalu mengkomersialkan budaya mereka sehingga tanpa sadar mereka telah mengurangi dan mengubah sesuatu yang khas dari adat mereka atau bahkan mengurangi nilai suatu budaya yang seharusnya bernilai religius. Contoh: upacara agama yang seharusnya dilakukan dengan khidmat dan khusyuk, tetapi untuk menyuguhkan apa yang diinginkan oleh wisatawan maka mereka mengkomersialkan upacara tersebut untuk wisatawan sehingga upacara agama yang dulunya khidmat dan khusyuk makin lama makin berkurang.

Yang ke dua adanya kesalahpahaman dalam hal berkomunikasi, budaya, dan nilai agama yang dapat mengakibatkan sebuah konflik.

- Permasalahan sosial : adanya percampuran budaya negatif antara wisatawan dengan masyarakat setempat.

Pengembangan pariwisata juga berpengaruh atau adanya kendala yang didapat terhadap kualitas dari sumber daya manusia (kualitas SDM) yang masih kurang selama ini, yaitu pelayanan terhadap kondisi lapang yang kurang aman dan kurangnya petugas kebersihan untuk menjaga area obyek wisata. Lembaga-lembaga yang mengurus industri pariwisata ini hendaknya terus meningkatkan kemampuan dibidang pariwisata melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan dan juga daya yang diberikan untuk meningkatkan pariwisata dalam meningkatkan atau menambaha fasilitas yang ada disekitar obyek wisata.

4.4.2 Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan

Banyak orang berpendapat bahwa pariwisata dengan sendirinya akan dilaksanakan dengan cara yang ramah lingkungan terhadap alam. Pendapat ini didasari pengandaian bahwa daya tarik wisata, antara lain, menyangkut lingkungan yang bersih dan sehat sebagai persyaratan utama yang hampir menjadi kebutuhan yang mutlak sifatnya.

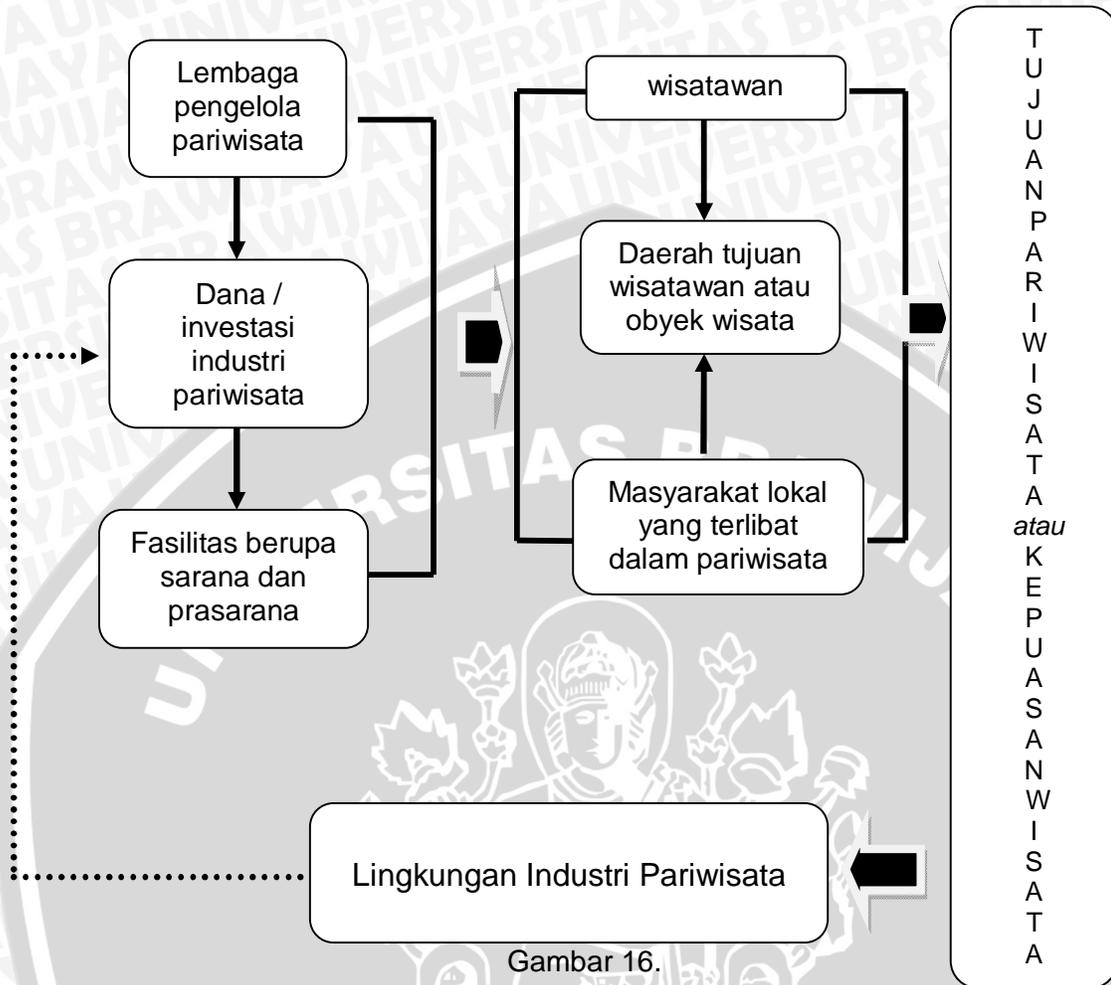
Istilah bersih dan sehat harus dipahami, tetapi sebagai nalar sehat dan tujuan yang bersih dari pengelola kegiatan wisata didalam daerah pembangunan pariwisata tertentu.

Masalahnya ialah, dengan lingkungan di suatu pihak, dan sumber daya alam dilain pihak, dan keduanya diperlukan untuk mendukung daerah wisata tertentu. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam selama pembangunan industri

pariwisata, lingkungan hidup pasti berubah sebagai akibat sampingan dan dengan cara yang tidak direncanakan.

Berbagai jenis perubahan lingkungan tersebut dapat terjadi dan timbul yang dapat merubah menjadi dampak lingkungan terhadap komunitas hayati dan masyarakat manusia. Jelas bahwa pengelolaan lingkungan dalam pembangunan pariwisata harus berupaya memasukkan dampak kegiatan yang positif terhadap lingkungan kedalam pembangunan pariwisata sebagai nilai tambah yang nyata. Namun demikian, perhatian juga harus secara khusus diberikan bagi upaya mencegah dan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat berpengaruh buruk terhadap pembangunan pariwisata dalam jelajah luas berbagai akibat yang saling mempengaruhi, termasuk dampak sosial terhadap perilaku, sikap dan persepsi pengunjung terhadap kualitas lingkungan beberapa objek wisata tertentu.

Suatu tempat wisata tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dikatakan dengan adanya dampak atau pengaruh yang positif maupun negatif karena adanya pengembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang meningkat. Dampak akibat adanya tempat wisata tentu mempengaruhi ke lingkungan sekitarnya dan siapa saja didalam lingkungan tersebut. Sehingga yang terkena dampak positif dan negatifnya adalah masyarakat, lingkungan, ekonomi dan sosial. Dapat disimpulkan atau digambarkan dalam bagan dibawah ini mengenai aktivitas pariwisata :



Gambar 16.

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini pencemaran lingkungan atau obyek wisata oleh manusia:



Gambar 17. Pencemaran Lingkungan Pada Obyek Wisata Pantai Prigi

Masyarakat dalam lingkungan suatu obyek wisata sangatlah penting dalam kehidupan suatu obyek wisata karena mereka memiliki kultur yang dapat menjadi daya tarik wisata, dukungan masyarakat terhadap tempat wisata berupa sarana kebutuhan pokok untuk tempat obyek wisata, tenaga kerja yang memadai dimana pihak pengelola obyek wisata memerlukannya untuk menunjang keberlangsungan hidup obyek wisata dan memuaskan masyarakat yang memerlukan pekerjaan dimana membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk komunitas setempat. Bila suatu tempat wisata yang direncanakan dengan baik, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik. Pariwisata yang baik dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang ada di kawasan tersebut.

Tabel 14. Potensi Dampak Lingkungan

Faktor Lingkungan	Dampak terhadap lingkungan alam	Perubahan yang dapat terjadi
Dampak Langsung		
Wisatawan yang berdesakan	Tekanan, kerusakan, resiko, gangguan terhadap lingkungan	Penurunan kualitas, daya dukung lingkungan, keadaan darurat
Terlalu dipadati bangunan	Lingkungan sarat bangunan yang berakibat pemukiman kumuh yang tidak terencana	Lingkungan yang mengkota (urbanized) dan kurang menarik bagi pengunjung

Penggunaan berlebihan berbagai prasarana rekreasi, misalnya jalan dan jalur pelayaran	Bising, kemacetan lalu lintas, ancaman terhadap kehidupan liar & keamanan manusia	Terganggunya waktu istirahat wisatawan dan rawannya jalan oleh tanah longsor dan erosi
Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Ancaman dan rusaknya habitat alam dan keamanan manusia	Berubahnya estetika dan kualitas lingkungan
Dampak Tak Langsung		
Land preparation for infrastructure development	Hilangnya habitat flora dan kehidupan liar	Kerusakan, gangguan dan risiko oleh perubahan ekologi
Perkenalan dengan flora dan fauna eksotik	Persaingan ekologi dengan flora dan fauna alam	Perubahan terhadap rona lingkungan alam

Dari setiap dampak yang ditimbulkan obyek pariwisata hendaknya memandang industri pariwisata ini dapat mendatangkan dampak-dampak yang positif, seperti meningkatkan hubungan antar manusia (sosialisme), meningkatkan perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat disektor sosial ekonomi.

Industri pariwisata juga tidak dapat dianggap sebagai faktor utama dalam mempengaruhi perubahan dan perkembangan masyarakat, karena perubahan dan perkembangan masyarakat tidak dipengaruhi oleh pembangunan nasional, modernisasi, globalisasi, dan Westernisasi. Industri pariwisata memang, juga membawa berbagai perubahan dan perkembangan pada masyarakat dan kebudayaan lokal, seperti terjadinya perubahan struktur sosial, budaya dan ekonomi.

Industri pariwisata sangat membutuhkan dukungan besar dari semua pihak, sehingga Sapta Pesona dapat diwujudkan oleh warga masyarakat. Selama ini kualitas Sapta Pesona itu relatif masih-kurang. Selain itu pariwisata telah menumbuhkan sifat dan faham modernisme di kalangan warga masyarakat, dan

faham ini bukan ancaman bagi sifat dan faham tradisionalisme. Modernisme hendaknya diupayakan dapat berdampingan dengan faham tradisionalisme. Dengan begitu, maka diperlukannya berbagai upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia disemua sektor kehidupan modern, khususnya perlu ditingkatkan terus kualitas SDM di sektor industri kepariwisataan.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi pengembangan pariwisata di Pantai Prigi dan Pantai Pasir Putih Desa Tasikmadu Kabupaten Trenggalek, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil sumber daya alam (SDA) wisata yang ada di Kecamatan Watulimo yang sudah di kembangkan ada 5 obyek wisata, yang diantaranya pasir putih dan juga Pantai Prigi yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari obyek wisata tersebut.
2. Peran pemerintah daerah (Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya) dalam menangani obyek wisata Pantai yang ada di Desa Tasikmadu yaitu;
 - Dengan dibangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS), Kabupaten Trenggalek yang dapat menjadi salah satu Jalur Wisata Nasional melewati Jawa Timur, sehingga dapat mendukung perkembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek.
 - Melengkapi obyek-obyek wisata, terutama obyek wisata prioritas dengan fasilitas penunjang yaitu dengan dibangunnya Ruko-ruko yang ada disekitar obyek wisata, penambahan sistem jaringan air bersih dan juga listrik.
3. Dampak obyek wisata Pantai terhadap masyarakat pesisir
 - Dampak sosial berupa: perubahan dalam cara berfikir dan mengetahui, perubahan dalam memilih lapangan kerja,

perubahan pola-pola interaksi dan komunikasi, perubahan dalam interaksi atau hubungan kerja.

- Dampak lingkungan berupa: pencemaran atau degradasi lingkungan.
- Dampak Ekonomi berupa: penambahan lapangan kerja atau peluang usaha baru sehingga dapat menghasilkan pendapatan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian kali ini adalah :

1. Dampak Positif :

Bagi pemerintah Daerah setempat :

- Perlu adanya komitmen antara pemerintah dengan para investor (swasta) dalam pengembangan industri pariwisata, guna meningkatkan SDM (pelayanan) karena kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan sesuai dengan sasarannya, meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang seperti hotel, pondok penginapan, rumah makan dan lain-lain.
- Pemberian izin pembangunan ruko atau tempat usaha di daerah sekitar wisata akan mendapatkan pajak dari pembangunan tersebut. Namun tetap dilihat dari kondisi lingkungannya.
- Perlu di adakanya acara atau atraksi alam untuk mengajak para pengunjung atau wisatawan akan peduli terhadap lingkungan dengan cara menanam mangrove atau pemulihan karang-karang yang sudah rusak di daerah ekowisata.

- Pemberian sanksi yang tegas bagi para pengunjung atau masyarakat setempat yang merusak fasilitas dan daerah konservasi dengan cara membayar denda sesuai dengan apa yang telah dirusak.
- Fokus dalam pengembangan di bidang sosial untuk peningkatan taraf pendidikan nonformal seperti; pelatihan, dan kursus keterampilan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir lainnya yang beraktifitas di daerah kawasan pantai. Dari aspek pelayanan keamanan perlu diadakan yang mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang murah. Selain dari pada itu pemerintah perlu merangsang tumbuh kembangnya lembaga-lembaga sosial yang berpihak kepada masyarakat. Seperti Perlu pengembangan sumber daya manusia yaitu: peningkatan keterampilan dan kualitas kerja masyarakat dengan memberikan fasilitas latihan kerja, dan membentuk kelompok usaha dan unit-unit kerja untuk memperkuat modal usaha dan memperluas kesempatan kerja.

Bagi masyarakat setempat :

- Membuka lahan usaha baru (jasa) dengan menyediakan sesuatu yang berbeda, seperti penyediaan perkemahan di sekitar pantai, penyediaan alat untuk menyelam serta pelatihannya, dan juga menyediakan makanan khas dari Trenggalek itu sendiri.
- Ditempatinya ruko-ruko yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena hal tersebut dapat membuat kawasan pantai dapat terlihat rapih dan tidak kumuh, karena banyak terpal dan juga bambu sebagai penahanya.

- Perlunya komitmen antar masyarakat (lembaga lokal) yang menggunakan lahan wisata dalam menjaga lingkungan pantai atau konservasi guna menjaga kelestarian alam dan keselamatan dari biota pantai itu sendiri.
- Perlunya menjaga dan memelihara lingkungan pantai sebagai obyek dan daya tarik wisata agar tetap memberikan suasana asri dengan tetap memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.
- Meningkatkan diversifikasi kerja dan usaha dalam bidang jasa pariwisata yang ramah lingkungan.
- Mempertahankan kualitas lingkungan dengan mengacu pada peraturan yang ada.

2. Dampak Negatif :

Bagi Pemerintah daerah setempat :

- Seharusnya kelestarian alam sesuai dengan daya dukung yang ada jadinya tidak kelebihan pengunjung yang mengakibatkan kerusakan alam, ada beberapa cara mempertimbangkan sesuai dengan daya dukung yang ada, yaitu daya dukung fisik dari daerah kawasan itu sendiri, daya dukung realitas dan daya dukung yang direkomendasikan.
- Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya-upaya perlindungan sumberdaya alam di lingkungan mereka, maka kegiatan pendidikan publik mengenai konsep dasar pengelolaan sumberdaya perlu terus dilakukan.
- Memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat di kawasan wisata khususnya permukiman masyarakat di lokasi yang kurang strategis untuk usaha dengan menyediakan akses pengunjung atau wisatawan jalur wisata.

3. Bagi akademis atau penelitian selanjutnya

Penelitian ini baru membahas dampak dari pengembangan pariwisata dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya terhadap masyarakat pesisir. Namun, sesungguhnya masih banyak lagi aspek-aspek lain dari pengembangan pariwisata yang dapat dianalisis seperti aspek politik, hukum, teknologi dan informasi. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih jauh terhadap dampak yang di dapat dari pengembangan pariwisata.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Lampiran 2

Tanggal 19 Mei 2010

khodijah - penarik jaring tarik di Pantai Prigi

Saya : Kalo boleh saya tau nama ibu siapa?

Ibu : Ibu khodijah

Saya : ibu asli orang sini? Sudah berapa lama kerja seperi ini bu?

Ibu : saya asli tasikmadu, lumayan sudah lama.

Saya : biasanya kapan saja diadakan tarik jaring ini bu?

Ibu : pada saat musim ikan saja, sekarang juga baru mulai musim ikannya.

Saya : dari jam berapa narik jaringnya? Dan dibayar berapa untuk sekali narik ini bu?

Ibu : mulainya dari jam 07.00 - 12.00, untuk seharian menarik jaring hanya di beri upah Rp.20.000,-. Dalam sehari juga bisa dua kali dalam menarik jaring. Untuk sorenya mulai dari jam 13.00 - 17.00.

Saya : untuk menarik jaring ini, biasanya ibu dikasih apa dari juraganya?

Ibu : cuman di kasih minum saja mba, makannya tidak.

Saya : dengan adanya pariwisata ibu merasa terganggu tidak?

Ibu : enggak mba, justru kalau ada wisatawan yang datang malah membantu ibu-ibu yang sedang menarik jaring disini.

Ani - Pengunjung, Bandung

Saya : menurut ibu hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam obyek wisata disini?

Ibu : Dalam pengembangan di obyek wisata ini banyak hal-hal yang mesti perlu dikembangkan, khususnya tempat sampah dan juga taman bermain bagi

anak-anak. Di pantai prigi ini banyak sampah yang berserakan dan juga banyak barang-barang yang tidak terpakai dalam fasilitas wisata, sebaiknya dihilangkan, karena mengganggu penglihatan dan menjadi tidak nyaman. Dengan begitu diperlukanya dinas kebersihan untuk merawat dan menjaga wilayah pesisir ini.

Saya : bagaimana reaksi masyarakat pesisir yang ada ketika anda datang kesini? Dan bagaiman menurut anda tentang jarak tarik ini? Apa mengganggu untuk berwisata?

Ibu : untuk masyarakat disini ramah, dan masalah jaring tarik kami tidak merasa terganggu karena itu merupakan daya tarik tersendiri.

Saya : bagaimana mengenai pedagang-pedagang yang ada disekitar pantai?

Ibu : sangat mengganggu pemandangan, seharusnya dibuat sekat-sekat atau ruko-ruko untuk yang berjualan. Jadinya tertata rapih.

Tanggal 20 Mei 2010

Sunaryo - Kepala UPT Pasir Putih

Saya : Bagaimana dengan pedagang yang berada dipinggir pantai?

Bapak : Dari Dinas sudah memberikan kebijakan atau sudah ada aturannya terhadap pedang tersebut tapi masyarakat disini susah untuk diaturnya, dan kami sendiri yang dilapangan tidak mau beresiko tinggi, maksud kami seperti kebijakan yang di tepi pantai mestinya tidak boleh disitu, namun demikian ya.. ada beberapa kepentingan kabupaten. Dan disini juga ada yang Pro-kontra, ada yang memperbolehkan disitu, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri dilarang, yang dilapangan yang jadi korban apa daya, sudah ada kiosnya yang berada diarea parkir. Sudah ada kiosnya tapi tidak ditempati. Roda empat juga tidak boleh masuk pada saat hari-hari libur. Parkirnya juga sudah disediakan.

Saya : Kenapa tidak boleh masuk pa?

Bapak : ya karena sudah disediakan tempat parkir, untuk tempat wisatanya itu sendiri bukan untuk tempat parkir, tapi untuk berwisata. Sebenarnya sepeda motor atau roda dua itu juga tidak boleh masuk kedalam wisata, tetapi dari dinas juga masih membebaskan untuk sepeda biar masuk dan kita juga tidak punya kebijakan. Batasannya cuman roda dua yang diperbolehkan masuk, tetapi masuknya tidak boleh lewat dari arah pelabuhan tetapi dari barat arah pengeringan ikan.

Saya : kalau boleh tau wisata prigi dan pasir putih kapan berdirinya?

Bapak : Berdirinya 14 juni 1984.

Saya : untuk suasananya wisata ramai dimana pak?

Bapak : Diawal tahun kita Pariwisata yang lebih dominan ramai Prigi, ditahun 1999 ini sudah dominan ke Pantai Pasir Putih. Karena apa, karean pantai Prigi ditahun itu kealamiah Prigi sudah mulai hancur atau menghilang, kerana apa, yang pertama karena pantai prigi bergabung dengan pantai nelayan, karena pohon-pohon yang rindang ini, Pohon kelapa ini juga terserang hama, dalam bahasa jawa terkena Hama wambung dari Dinas Perkebunan dan Pertanian juga menyebutnya wambung, jadi semuanya habis pohon-pohon kelapa yang ada pantai Prigi. Jadi dari kami petugas pariwisata sendiri berusaha melakukan penghijauan kembali, ini bukan penanaman kembali pohon kelapa tapi pohon ketapang dan kami juga mempelajari tumbuhan apa yang cocok dan pas untuk daerah pantai dan berpasir, dan ternyata pohon ketapang ini yang paling cocok dan yang kedua trumbusi. Dari kami sudah mencoba untuk menanamnya di pantai prigi, cuman masyarakat sekitar sini kurang mendukung sekali dengan adanya kegiatan pariwisata ini, saya juga menyadari dari anak-anak muda yang moralnya bejat suka merusak tanaman ketapang ini, apalagi kalau malam hari dan sudah terkena alkohol, semua fasilitas di sini termasuk gazebo yang ada di pantai Prigi dirubuhkan atau di rusak dan fasilitas yang lain.

Saya : Apa dari Dinas tidak ada pengawasan?

Bapak : Dari kami juga sudah mencoba menyuruh beberapa karyawan untuk melaksanakan pengawasan di malam hari, tetapi karena wilayah wisata yang terlalu luas jadi kami juga tidak bisa menjaga semua. Tapi pas kita mengadakan pengawasan ternyata tidak ada masyarakat yang lagi mau merusak fasilitas yang ada. Namun demikian pas kami tidak melakukan pengawasan atau lengah ada yang merusak. Sebetulnya dari Dinas juga sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk mengamankan dari pada aset yang ada disini.

Saya : Bapak dari ritribusi pasir Putih? Lalu bagaimana upaya pengembangan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir yang ada disini?

Bapak : ia, dari ritribusi. Ya... sebetulnya ada.. dari kami cuman hanya mengusulkan ke Dinas. Kami hanya berkerja dilapang, jadi Dinas yang menurunkan kebijakan dari kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kaitannya dengan anggaran atau dana kami tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi dari kami dilapangan sementara melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebernya di pantai itu yang paling dibutuhkan hanya kebersihan, dari kami sudah menyediakan petugas kebersihannya di Prigi maupun Pasir Putih. Namun demikian area yang begitu luas ini, kami yang dilapangan dan petugas kami yang diretribusi juga setiap hari jumat memang saya galakan itu jumat bersih. Jadi petugas pariwisata yang khusus diretribusi tidak hanya sekedar menarik retribusi.

Saya : Apakah dari masyarakat pesisir disini mempunyai lembaga untuk menjaga lingkungan?

Bapak : ada mbak, dari kami juga sudah membentuk sebetulnya namanya POKDARWIS. Namun demikian ya itulah... dari kami juga sudah sering mengadakan penyuluhan dan pembinaan pada mereka-merka namun demikian kalau orang Prigi itu susah, jadi tidak seperti tempat-tempat wisata yang lain, kesadaran akan lingkungan sangat besar sekali. Namun disini Pokdarwis yang banyak kan pedagang-pedagang yang berjualan di tepi

pantai memang saya ambil dari situ. Jadi tujuan kami karena mereka-mereka menempati lahan wisata juga berusaha untuk biar buka usaha disitu maksud kami supaya bisa punya rasa memilik dan melindungi dari pada kawasan ini. Tapi ternyata ya... gitu-gitu aja lah...kalau tidak ada teguran dari petugas mereka hanya diam ditempat saja. Sebetulnya sudah tau apa yang dimau mereka, tujuannya hanya mencari untung saja, tidak peduli terhadap lingkungan. Kadang-kadang kami sendiri dari petugas kadang-kadang merasa jengkel, bosan dan sebagainya sak mereka-mereka. Tapi saya tidak boleh begitu terus, hanya kadang-kadang saja.

Saya : kalau disini alamnya kan sudah rusak, bagaimana bapak dengan masyarakat pesisir untuk menumbuhkan kayak program ekowisata?

Bapak : nah ini, kebetulan saya baru workshop dari Malang mengenai ekowisata. Kami dilapangan juga ok, kami juga sudah mengajukan permohonan, proposal dan sebagainya tapi yang penentu kebijakan bukan kami, kebijakan dari kabupaten. Kalau yang di kabupaten tidak menjalankan kami yang dilapang bagaimana? Untuk rencana sudah ada tapi pelaksanaanya juga belum.

Kusdu - Kepala UPT Prigi

Saya : Untuk sejarah tertulis dikembangkanya Pantai Prigi ini ada tidak pa?

Bapak : Untuk tertulisnya tidak ada, dari dulu semasa saya kecil Obyek wisata ini sudah ada. Mulai dari ditangani dengan PEMDA, lalu investor, dan sekarang ke PEMDA lagi yang menangani Obyek wisata ini.

Saya : Bagaimana kondisi sarana dan Prasaran yang ada di obyek wisata ini pak?

Bapak : Untuk sarana dan Prasarananya, ya.. beginilah keadaannya. Dan setiap tahunnya juga ada untuk membangun. Dulunya sudah diajukan untuk standar nasional, tapi sampai sekarang juga masih belum, sekarang cuman sampai standart provinsi, padahal Pelabuhan sudah jadi dan akan dibangun jalur lintas selatan yang dapat memudahkan perjalanan dari malang.

Tanggal 21 Mei 2010

Siska - DKP

Aq iki wes rodo lali, Konsep sebenarnya mereservasi, mau membuat kawasan konservasi yang disebut Fish sanctuary itu. Kawasanya meliputi 81 ha, tapi sebelum dibuat ini awalnya tuh di tenggelamkan terumbu karang buatan sebanyak 694 buah, dua kali dalam penenggelaman berupa *reef ball*. Untuk tahunnya pada tahun 2000 dan 2001. Ditenggelamkan di sini karena dari penelitian Brawijaya dulu REA namanya pada tahun 1998. Berdasarkan rekomendasi studi tersebut, kawasan ini karangnya sebenarnya sudah mengalami rusak parah. Maka akan diperbaiki dengan program TBK (Terumbu Karang Buatan) di kawasan Pasir Putih, nah harapannya setelah ditenggelamkan TBK itu dimones tumbuh berupa jenis terumbu karang seperti Acropora, dan beberapa jenis ikan ada juga, cuman karena sedimentasinya tinggi sekali. Karena di kawasan ini pohon-pohonnya banyak ditebangin jadi hasilnya juga tidak begitu banyak jenis terumbu karang yang tumbuh itu hanya jenis acropora sama karang otak, karang jahe sama apalagi gitu dan tidak sebagus di tempat lain karena sedimentasi yang tinggi itu. Selain itu, disini sebagai penjaga katakanlah namanya gugus fish sanctuary, nah mereka ini diberikan semacam insentif berupa kapal atau perahu dan ada jetty disana berupa jembatan. Nah itu sebenarnya untuk presentif menjaga kawasan ini sekaligus dia mendapatkan bayaran dari persewaan kapal. Ini juga bagian dari ekowisata yang ada disini. Untuk mangrovenya di kawasan ini masih belum, kayak yang di bali sudah ekowisata yang mangrove.

Suhartini - Kabid Pengelolaan SD. Kelautan

Untuk pengwasan kita masih ada yang POKMASWAS yang berperan disana, ketua untuk pengawasan penangkapan ada pak Tongso.

Tanggal 22 Mie 2010

Sirul - Penyewa ban dan sewa karpet di Pantai Pasir Putih

Saya : Kalo boleh saya tau nama ibu siapa?

Ibu : Ibu sirul.

Saya : ibu asli mana?

Ibu : saya asli karanggongso.

Saya : Ibu sudah lama berada di kawasan wisata disini? Kira-kira mulai kapan?

Ibu : Saya sudah lama disini, kira-kira baru tujuh bulan. Abis saki kira-kira lima tahun baru kerja disini.

Saya : Ibu dulunya kerja apa?

Ibu : Ibu Gak kerja, terus dikasih kerjaan ini. Kalau kerja diwarung kaki ibu sudah gak kuat kalau disuruh bolak-balik, sudah tua ibu ini. Ibu ditawarkan sama orang yang punya kios disini.

Saya : Kalau suami ibu kerja apa?

Ibu : Suami melaut cari ikan, tapi sekarang sudah kawin lagi dapat orang Ponoroggo, suami saya ninggalin saya dan anak saya sejak masih SD, jadi ibu kerja sendiri nyari uang, pindah lima warung sampai dua tahun buat sekolahin anak sampai SMA sudah itu langsung dinikahin. Sampai anak saya nikah bapaknya juga gak ada. Terus dapat kerja dipasir putih ini. Kalau dapat Rp. 20.000,- satu hari dikasih ke warung Rp. 10.000,-.

Saya : Kalau rame biasanya disini dapat berapa bu?

Ibu : Kalau rame disini biasanya dalam sehari dapat 50.000, dapat 60.000, 25.000, sampai 20.000 juga. Kalau tahun baru atau hari lebaran bisa dapat 100.000.

Saya : Untuk karpetnya harga sewanya berapa bu? Terus sewa bannya juga?

Ibu : Untuk karpet harganya 5000 seharian. Untuk ban yang kecil harganya 3000 dan yang besar 5000 bisa digunakan seharian.

Saya : selain dari sini ibu penghasilanya dari mana lagi?

Ibu : Enggak ada penghasilan apa-apa mba, cuman ini saja. Ibu juga kerja cuman hari sabtu, minggu, sama hari-hari libur atau tanggal merah. Hari

biasanya ibu dirumah ngemong cucu. Cucu ibu sama anak ibu tinggal dirumah.

Ibu : Yang punya sewaan ban ini yang punya juga beda-beda dari kios-kios yang disini, setiap motif banya beda-beda jadi biar tidak ketuker dengan yang lain.

Saya : Disini pernah ada kegiatan kayak ritual gak bu?

Ibu : Pernah, pas bulan Suro, disini gak rame seperti dipelabuhan, acaranya membuang tumpeng ke laut.

Katiyem – Penjual Ikan Asap Di Wisata Pantai Prigi

Saya : Ibu sudah berapa lam jualan disini?

Ibu : Saya sudah 20 tahun jualan disini.

Saya : Satu hari biasanya bisa bakar Ikan Berapa, bu?

Ibu : Tergantung ramainya, kalo lagi ramai bisa bakar ikan satu kwintal, kalo lagi sepi 25 kg saja tidak habis. Pokonya rata-rata bisanya setengah kwintal.

Saya : Kalau misalnya tidak habis bagaimana?

Ibu : Dijualnya kepasar sini mba, pasar tasikmadu.

Saya : Dulu sama sekarang lebih besar mana bu pendapatanya??

Ibu dulu dipindah ruko kapan?

Ibu : Dapat setengah kwintal pendapatan bersihnya dapat Rp. 50.000,- hasil segitu bagi pedagang pengasapan ikan sudah senang.

Saya : Ibunya asli tasikmadu sini?

Ibu : ia saya asli sini, rumah saya dekat terminal. Mampir yagh kerumah yagh..

Saya : kendala apa yang ibu pernah hadapi?

Ibu : Kalau ikannya bagus harganya naik, tapi kalau ikannya jelek harganya juga turun.

Lampiran 1

BUPATI TRENGGALEK



**SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 82 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN BUDAYA
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata**

Pasal 24

- (1) Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan promosi wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas;
- b. penyusunan program / kegiatan di bidang kebudayaan dan promosi wisata ;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelestarian budaya dan purbakala, promosi wisata, dan pengembangan seni budaya ;
- d. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dibidang kebudayaan dan promosi wisata ;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Uinerja dibidang kebudayaan dan promosi wisata ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 26

(1) Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Seksi Pelestarian Budaya dan Purbakala;
- b. Seksi Promosi Wisata;
- c. Seksi Pengembangan Seni Budaya.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakari t-ugasnya berada di bawah dan bertanggungj'awab kepa.da Kebudayaan dan Promosi Wisata.

Pasal 27

Seksi Pelestarian Budaya dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pelestarian budaya dan purbakala;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pelestarian budaya dan purbakala;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pelestarian budaya dan purbakala;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelestarian budaya dan purbakala;

- e. menyelenggarakan kegiatan penggalian dan dokumentasi sumber sejarah, budaya, kepurbakalaan dan publikasi sejarah;
- f. menyelenggarakan kegiatan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan watak dan pekerti bangsa serta pemahaman sejarah nasional dan sejarah daerah;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan lembaga adat;
- h. memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan makam leluhur;
- i. melakukan pengelolaan cagar budaya dan pemanfaatan museum purbakala daerah;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pelestarian budaya dan purbakala;
- k. melakukan pendataan hasil pelestarian budaya dan purbakala ;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelestarian Budaya dan Purbakala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi wisata;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan promosi wisata;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan promosi wisata;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standa', prosedur dan kriteria promosi wisata;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyelenggaraan kerja sama regional dan internasional dibidang kepariwisataan;
- f. menyeienggarakan kegiatan widya wisata;
- g. menyeienggarakan kegiatan promosi wisata;
- h. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi wisata;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi promosi wisata;
- j. melakukan pendataan hasil kerja dibidang promosi wisata;

- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Pengembangan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Psss 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pengembangan seni budaya;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan seni budaya;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pengembangan seni budaya;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan seni budaya;
- e. menyelenggarakan kegiatan festival, pameran dan lomba seni budaya secara berjenjang dan berkala;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional;
- g. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi kebudayaan, revitalisasi dan kajian seni;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pengembangan seni budaya;
- j. melakukan pendataan hasil kerja dibidang pengembangan seni budaya;
- k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Promosi Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 30

- (1) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa'sal 30 ayat (2) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang obyek dan daya tarik wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala dinas;
- b. penyusunan program / kegiatan dibidang obyek dan daya tarik wisata;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan obyek wisata, daya tarik wisata, serta usaha jasa dan penyuluhan wisata;
- d. pembinaan, pengendalian dan peiaporan kinerja dibidang obyek dan daya tarik wisata;
- e. pemantauan, evaluasi dan peiaporan kinerja dibidang obyek dan daya tarik wisata;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Seksi Daya Tarik Wisata ;
 - c. Seksi Usaha Jasa dan Penyuluhan Wisata.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 33

Seksi Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang obyek wisata;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan obyek wisata;
 - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan obyek wisata ;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria obyek wisata ;
 - e. melakukan inventarisasi dan penggalian potensi obyek wisata dan kawasan wisata ;
 - f. melakukan pengembangan dan pengamanan obyek wisata dan kawasan wisata ;
 - g. melakukan pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata ;
 - h. menyiapkan data sebagai bahan rekomendasi perizinan pengelolaan di bidang obyek wisata, rekreasi dan hiburan di kawasan wisata ;
 - i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi obyek wisata ;
 - j. melakukan pendataan hasil kerja obyek wisata ;
 - k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang daya tarik wisata ;

- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan daya tarik wisata ;
- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan daya tarik wisata ;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, stands-prosedur dan kriteria daya tarik wisata ;
- e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang daya tarik wisata ;
- f. menyelenggarakan pentas seni dan atraksi wisata pada kawasan wisata/ kegiatan budaya sebagai daya tarik wisata-daerah' ;
- g. meiakukan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya dan aset wisata lainnya sebagai daya tarik wisata ;
- h. memfasiitasi pembangunan dan perigembangan sarana dan prasarana obyek wisata serta kawasan wisata ;
- i. meiakukan kegiatan peiayanan teknis dan administrasi dibidang daya tarik wisata ;
- j. meiakukan pendataan hasil kerja daya tarik wisata ;
- k. memantau dan mengevaiuasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Usaha Jasa dan Penyuluhan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang usaha jasa dan penyuluhan wisata ;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan usaha jasa dan penyuluhan wisata ;

- c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan usaha jasa dan penyuluhan wisata ;
- d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria usaha jasa dan penyuluhan wisata ;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan perekonomian pada masyarakat; lingkungan obyek wisata dan kawasan wisata ;
- f. melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana car. prasarana fasilitas penunjang dan pelayanan kepariwisataan ;
- g. melakukan pembinaan pengendalian mutu penyelenggaraan kegiatan jasa kepariwisataan ;
- h. melakukan pengembangan informal pariwisata,-pembentukan dan pengelolaan pusat pelayanan informasi pariwisata ;
- i. melakukan kegiatan kampanye sadar wisata dan sapta pesona ;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi usaha jasa dan penyuluhan wisata ;
- k. melakukan pendataan hasil kerja usaha jasa dan penyuluhan wisata ;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UPT DINAS

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Dinas dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.